



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2025–2029



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengartikan bahwa perencanaan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dan dalam waktu tertentu.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen selain mengacu pada amanat Undang-undang tersebut juga mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Keselarasan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 dilakukan dengan melakukan telaah prioritas dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dipergunakan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dengan program prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Dokumen ini dipergunakan sebagai kontrak kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya atas kerja keras dan kerjasama dari seluruh tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, pemikiran, kami sampaikan terima kasih yang setulus tulusnya.

Kebumen, 19 September 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Edi Rianto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19701101 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang.....	8
1.2. Landasan Hukum	10
1.3. Maksud dan Tujuan.....	13
1.4. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	8
A.Struktur Organisasi	10
2.1.2 Sumber Perangkat Daerah	20
A.Sumber Daya Aparatur	20
B.Sarana dan Prasarana	25
C.Teknologi Informasi.....	31
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	35
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	39
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	42
2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah.....	42
A.Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	43
B.Telaah	45
1)Telaah Kementerian Dalam Negeri	45
2)Telaah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	48

3)Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	49
4)Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen.....	50
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	54
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	57
3.2 Strategi Perangkat Daerah	63
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	65
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
4.1 Uraian Program dan Kegiatan	68
4.2 Uraian Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	86
4.3 Uraian Sub kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	108
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	113
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	115
BAB V PENUTUP.....	118
LAMPIRAN	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah SDM Setda Tahun 2021-2026	20
Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	21
Tabel 2.3. Komposisi ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Tahun 2025	24
Tabel 2.4. Komposisi ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	24
Tabel 2.5. Daftar Inventaris Barang Sekretariat Daerah	25
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen 2021-2025	32
Tabel 2.7. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Setda 2021-2025	34
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan Pendanaan Pelayanan Setda 2021-2025	35
Tabel 2.9. Sasaran Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen .	39
Tabel 2.10. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44
Tabel 2.11. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	56
Tabel 3.1. Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	58
Tabel 3.2. Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	61
Tabel 3.3. Penahapan Renstra Setda Tahun 2025-2029	64
Tabel 3.4. Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	65
Tabel 3.5. Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	65
Tabel 4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.....	68
Tabel 4.2. Program Perangkat Daerah	72
Tabel 4.3. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD	74
Tabel 4.4. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Kebumen	86
Tabel 4.5. Subkegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	108
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Sekretariat	

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030..... 114

Tabel 4.7. Indikator Kinerja Kunci..... 115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Setda Kabupaten Kebumen ... 10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pohon Kinerja 111

Lampiran 2. Cascading..... 112

Lampiran 3. Renja Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Beserta
Pendanaan 113

Lampiran 4. Target IKK 114

Lampiran 5. Rumus Perhitungan Indikator (Tujuan, Sasaran, Program,
Kegiatan 115

Lampiran 6. SK Penyusunan Renstra 116

Lampiran 7. Dokumen Pelaksanaan Forum Renstra..... 117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kebumen.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tahap ini dilakukan dengan:
 - a) Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
 - b) Melaksanakan orientasi mengenai Renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah; dan
 - c) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah
3. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Sekretariat Daerah analisis permasalahan, penelaahan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
4. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah penyempurnaan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Forum Sekretariat Daerah dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda, dan Kepala/perwakilan dari masing-masing Bagian. Forum tersebut membahas visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Sekretariat Daerah. Hasil dari forum tersebut kemudian dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029.
6. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Rancangan akhir Renstra Sekretariat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
15. Peraturan Daerah 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 108).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang memuat program dan kegiatan.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja.

4. Sebagai acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Telaahan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang tujuan dan sasaran serta strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran dan Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun kedepan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini berisi tentang uraian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran & pendanaan indikatif jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen selama lima tahun kedepan. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator

Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut dan analisis terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

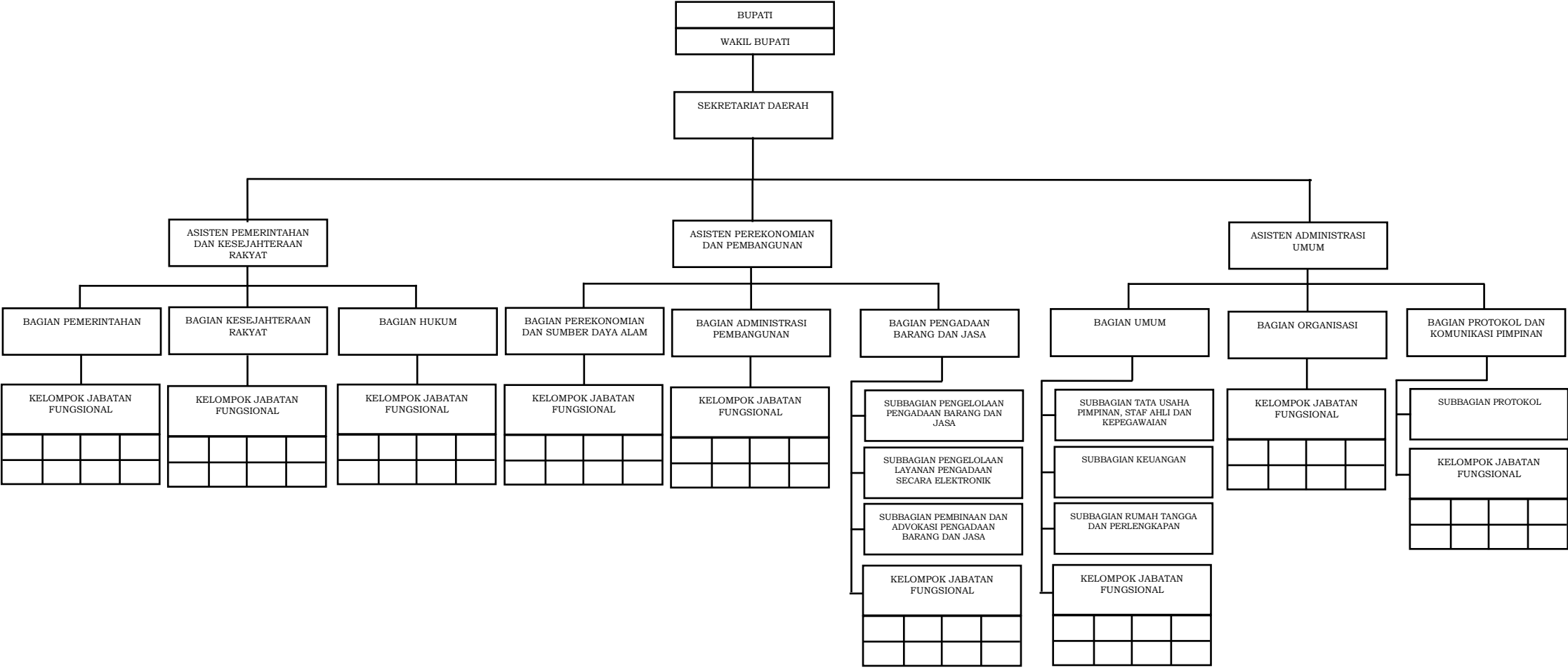
1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pengoordinasian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
6. Pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah;
7. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai analisis kebutuhan struktur yang direncanakan sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - 1) Bagian Pemerintahan
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 3) Bagian Hukum
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan,
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,
4. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi:
 - 1) Bagian Umum,
 - 2) Bagian Organisasi,
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Struktur Organisasi

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen



Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada berdasarkan analisis Peraturan Daerah Nomor 108 Tahun 2021, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Bagian Pemerintahan:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pertanahan, dan kesatuan bangsa dan politik.

Fungsi Bagian Pemerintahan:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerjasama dan otonomi daerah,
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerjasama dan otonomi daerah;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pertanahan, dan kesatuan bangsa dan politik;
- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

- pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerjasama dan otonomi daerah;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerjasama dan otonomi daerah; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Tugas Pokok Kesejahteraan Rakyat:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, pendidikan,kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata.

Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, dan

pariwisata;

- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Tugas Pokok Bagian Hukum:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi.

Fungsi Bagian Hukum:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;

dan

- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Tugas Pokok Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, transmigrasi, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

Fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah, transmigrasi, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perekonomian, sumber daya alam, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

- 5) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- 6) pengoordinasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau; dan
- 7) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Tugas Pokok Bagian Administrasi Pembangunan:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang

- perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
 - 5) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
6. Tugas Pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- Fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- 5) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Tugas Pokok Bagian Umum:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Fungsi Bagian Umum:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, dan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata

usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

- 5) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Tugas Pokok Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, publikasi dan dokumentasi pimpinan, komunikasi dan informasi, persandian, dan statistik.

Fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang protokol, publikasi dan dokumentasi pimpinan;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di protokol, publikasi dan dokumentasi pimpinan;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, publikasi dan dokumentasi pimpinan, komunikasi dan informasi, persandaian, dan statistik;
- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, publikasi dan dokumentasi pimpinan;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang protokol, publikasi dan dokumentasi pimpinan; dan

- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
9. Tugas Pokok Bagian Organisasi:
- melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi, unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- Fungsi Bagian Organisasi:
- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi;
 - 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi;
 - 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi, unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi;
 - 5) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis

- jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Sumber Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya, jumlah Pegawai pada Sekretariat Daerah berdasarkan Analisis Beban Kerja sebanyak 292 pegawai. Namun sampai dengan Desember 2024 baru sebanyak 135 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah SDM Setda Tahun 2021-2026

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Laki-laki	95	95	89	81	77	87
2	Perempuan	65	65	73	61	58	72
Jumlah ASN		160	160	162	142	135	159

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen peningkatan pada tahun 2021 hingga 2022 dan mengalami penurunan di tahun 2023 hingga 2024 dan mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2025. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pengadaan pegawai melalui jalur CPNS dan PPPK pada tahun anggaran 2024.

Sedangkan Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan
Jabatan Tahun 2025

Nama Jabatan	Golongan	Eselon	Jumlah
Sekretaris Daerah	IV/c	2A	1
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	IV/c	2B	1
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	IV/c	2B	1
Asisten Administrasi Umum	IV/c	2B	1
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	IV/c	2B	1
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	IV/c	2B	1
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	IV/c	2B	1
Kepala Bagian Umum	III/d	3A	1
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	IV/b	3A	1
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	IV/b	3A	1
Kepala Bagian Pemerintahan	IV/b	3A	1
Kepala Bagian Hukum	IV/b	3A	1
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	IV/a	3A	1
Kepala Bagian Organisasi	IV/b	3A	1
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	IV/a	3A	1
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	IV/b	3A	1
Kepala Subbagian Keuangan	III/d	4A	1
Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	IV/a	4A	1
Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	III/d	4A	1
Kepala Subbagian Protokol	III/d	4A	1
Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	III/c	4A	1
Ajudan	-	-	1
Analisis Advokasi Hukum	-	-	1
Analisis Hukum Ahli Pertama	-	-	3
Analisis Infrastruktur	-	-	1
Analisis Jabatan	-	-	1

Nama Jabatan	Golongan	Eselon	Jumlah
Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	-	10
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	-	-	13
Analisis Kesejahteraan Rakyat	-	-	3
Analisis Pemerintahan Daerah	-	-	1
Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	-	-	1
Analisis Perekonomian	-	-	3
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	1
Analisis Protokol	-	-	1
Analisis Publikasi	-	-	1
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	-	-	2
Arsiparis Terampil	-	-	3
Bendahara	-	-	2
Fasilitator Pemerintahan	-	-	2
Operator Layanan Operasional	-	-	2
Penata Kelola Pemerintahan	-	-	2
Penata Layanan Operasional	-	-	1
Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	-	-	1
Pengadministrasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	-	-	4
Pengadministrasi Pemerintahan	-	-	1
Pengadministrasi Perkantoran	-	-	1
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	-	-	1
Pengadministrasi Umum	-	-	20
Pengelola Akuntansi	-	-	1
Pengelola Bantuan Hukum	-	-	1
Pengelola Keuangan	-	-	1
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	-	1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	-	-	1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	-	-	4
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	-	-	17
Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	-	-	1
Pengelola Urusan Agama	-	-	1

Nama Jabatan	Golongan	Eselon	Jumlah
Pengemudi	-	-	2
Pengolah Data Informasi dan Hukum	-	-	1
Penyusun Rancangan Perundang-undangan	-	-	2
Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	-	-	1
Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	-	-	1
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	-	-	2
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	-	-	2
Perencana Ahli Pertama	-	-	1
Pramu Bakti	-	-	3
Penata Keprotokolan	-	-	2
Pranata Hubungan Masyarakat (CJFT)	-	-	1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	-	-	1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	-	2
Pranata Jamuan	-	-	2
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	-	-	1
Teknisi Listrik dan Jaringan	-	-	2
Verifikator Keuangan	-	-	1
Jumlah			159

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, jabatan yang mendominasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen analis kebijakan (10 analis kebijakan ahli muda dan 13 analis kebijakan ahli pertama). Hal ini selaras dengan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, koordinasi administratif, serta pelayanan teknis kepada seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan Golongan dan Ruang Komposisi ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Komposisi ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
IV	11	8	19	12%
III	58	53	111	70%
II	11	5	16	10%
I	0	1	1	1%
IX	5	4	9	6%
VII	1	0	1	1%
V	2	0	2	1%
TOTAL	88	71	159	100%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2025

Berdasarkan Komposisi Golongan dapat diketahui bahwa ASN dengan Golongan III mempunyai persentase paling tinggi yakni 70% golongan III disusul 12 % golongan IV, dan 10% golongan II.

Tabel 2.4
Komposisi ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
S2	18	8	26	16%
S1	48	52	100	63%
D3	1	5	6	4%
SMA/SMK	19	6	25	16%
SMP	0	1	1	1%
SD	1	0	1	1%
TOTAL	87	72	159	100%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2025

Berdasarkan pendidikan komposisi ASN Sekretariat Daerah paling tinggi adalah berpendidikan S1 atau 63%, kemudian S2 dan SMA/SMK masing-masing sebesar 16%.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Daftar Inventaris Barang Sekretariat Daerah

Nama Aset Barang	KONDISI			Jumlah	Keterangan
	Baik	Kurang Baik	Rusak		
GEDUNG DAN TANAH					
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2			2	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	13	1		14	
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1			1	
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2			2	
Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1			1	
Gedung Garasi/Pool Permanen	3			3	
Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2			2	
Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1		1	2	
Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1			1	
Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		1		1	
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4			4	
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1			1	
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3			3	
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1			1	
Tanah Bangunan Stasiun Kereta Api	1			1	
Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1			1	
Tanah Bangunan Terminal Darat	1			1	
Tanah Kaveling (dst)	1			1	
Tanah Lapangan Lainnya	1			1	
Tanah Lapangan Tennis	1			1	
Tanah Sawah Irigasi	1			1	
Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	2			2	

Nama Aset Barang	KONDISI			Jumlah	Keterangan
	Baik	Kurang Baik	Rusak		
KENDARAAN					
Sedan	1			1	Perlu Pemeliharaan
Sepeda Motor	74	7		81	Perlu Pemeliharaan
Alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1			1	Perlu Pemeliharaan
Station Wagon	33			33	Perlu Pemeliharaan
Pick Up	1			1	Perlu Pemeliharaan
Sepeda	3			3	Perlu Pemeliharaan
SARANA DAN PRASARANA ELEKTRONIK					
A.C. Split	147			147	Perlu Pemeliharaan
A.C. Window	58			58	Perlu Pemeliharaan
AC Split	6	1		7	Perlu Pemeliharaan
Air Blower	8			8	Perlu Pemeliharaan
Amplifier	1			1	Perlu Pemeliharaan
Audio Amplifier	5			5	Perlu Pemeliharaan
Audio Visual	2			2	Perlu Pemeliharaan
Audio Attenuator	1			1	Perlu Pemeliharaan
Camera Electronic	8	1		9	Perlu Pemeliharaan
Camera film		1		1	Perlu Pemeliharaan
Camera Video	5			5	Perlu Pemeliharaan
Compact Disc Recorder	1			1	Perlu Pemeliharaan
Concrete Hammer Set	1			1	Perlu Pemeliharaan
Copy Board/Elektric White Board	2			2	Perlu Pemeliharaan
Film Projector	2			2	Perlu Pemeliharaan
Handy Cam	1	1		2	Perlu Pemeliharaan
Handy Talky (HT)	23			23	Perlu Pemeliharaan
Hard Disk	7			7	Perlu Pemeliharaan
Lap Top	76	1		77	Perlu Pemeliharaan
Layar Film/Projector	5			5	Perlu Pemeliharaan
LCD Projector/Infocus	17			17	Perlu Pemeliharaan
Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1			1	Perlu Pemeliharaan
Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1			1	Perlu Pemeliharaan
Jaringan Transmisi Lain-lain	1			1	Perlu Pemeliharaan
DVD Player	1			1	Perlu Pemeliharaan
Electric generating set lainnya (dst)	5			5	Perlu Pemeliharaan
Exhause Fan	16			16	Perlu Pemeliharaan
Loudspeaker	2			2	Perlu Pemeliharaan
Megaphone	1			1	Perlu Pemeliharaan
Monitor	8			8	Perlu Pemeliharaan
Note Book	9	1		10	Perlu Pemeliharaan
Tablet PC	5			5	Perlu Pemeliharaan
Mesin Fotocopy Folio	1			1	Perlu Pemeliharaan
Microphone	22			22	Perlu Pemeliharaan
Overhead Projector	1			1	Perlu Pemeliharaan
P.C Unit	48	1		49	Perlu Pemeliharaan

Nama Aset Barang	KONDISI			Jumlah	Keterangan
	Baik	Kurang Baik	Rusak		
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	5			5	Perlu Pemeliharaan
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4			4	Perlu Pemeliharaan
Server	3			3	Perlu Pemeliharaan
Slide Projector	1			1	Perlu Pemeliharaan
Peralatan Minikomputer lainnya	3			3	Perlu Pemeliharaan
Peralatan Personal Komputer lainnya	3			3	Perlu Pemeliharaan
Power Amplifier	1			1	Perlu Pemeliharaan
Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	44			44	Perlu Pemeliharaan
Printer (Peralatan Personal Komputer)	100	4		104	Perlu Pemeliharaan
Peralatan Jaringan lainnya	3			3	Perlu Pemeliharaan
peralatan studio audio lainnya (dst)	30			30	Perlu Pemeliharaan
Personal Komputer lainnya	1			1	Perlu Pemeliharaan
Pesawat Telephone	27			27	Perlu Pemeliharaan
Photo Tustel	1			1	Perlu Pemeliharaan
Sound System	15			15	Perlu Pemeliharaan
Stabilizer	4			4	Perlu Pemeliharaan
Stationary Generating Set	6			6	Perlu Pemeliharaan
Vertikal Blind	17			17	Perlu Pemeliharaan
Transportable Generating Set	1			1	Perlu Pemeliharaan
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1			1	Perlu Pemeliharaan
Telephone (PABX)	3			3	Perlu Pemeliharaan
Telephone Mobile	1			1	Perlu Pemeliharaan
Televisi	66			66	Perlu Pemeliharaan
Tripod Camera	1			1	Perlu Pemeliharaan
Tustel	3	1		4	Perlu Pemeliharaan
Uninterruptible Power Supply (UPS)	10			10	Perlu Pemeliharaan
Unit Power Supply	6			6	Perlu Pemeliharaan
Video Tape Recorder Portable	1			1	Perlu Pemeliharaan
White Board	7		1	8	Perlu Pengadaan
White Board Electronic	2			2	Perlu Pemeliharaan
Wireless	9	2		11	Perlu Pemeliharaan
Wireless Amplifier	4			4	Perlu Pemeliharaan
SARANA DAN PRASARANA LAINNYA					
Alat Dapur lainnya	3			3	Perlu Pemeliharaan
Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	7			7	Perlu Pemeliharaan
Alat Kantor Lainnya	87			87	Perlu Pemeliharaan
Alat Kesehatan olahraga lainnya	14			14	Perlu Pemeliharaan
Alat Kesenian Lain-lain	2			2	Perlu Pemeliharaan
alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	11			11	Perlu Pemeliharaan
alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1			1	Perlu Pemeliharaan
Alat Musik Modern/Band	1			1	Perlu Pemeliharaan
Alat Musik Tradisional/Daerah	4			4	Perlu Pemeliharaan
Alat Pemadam/Portable	34			34	Perlu Pemeliharaan

Nama Aset Barang	KONDISI			Jumlah	Keterangan
	Baik	Kurang Baik	Rusak		
Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	15			15	Perlu Pemeliharaan
Alat Pemanas Ruangan	2			2	Perlu Pemeliharaan
Alat Rumah Tangga Lain-lain	69		3	71	Perlu Pengadaan
alat ukur lain-lain lainnya (dst)	7			7	Perlu Pemeliharaan
Barang Kerajinan Lain-lain	2			2	Perlu Pemeliharaan
Brandkas	6	1		7	Perlu Pemeliharaan
Buffet Kayu	1			1	Perlu Pemeliharaan
Camera Wall Box	6			6	Perlu Pemeliharaan
Cermin Besar	1			1	Perlu Pemeliharaan
Dispenser	20			20	Perlu Pemeliharaan
Display	3			3	Perlu Pemeliharaan
Facsimile	2			2	Perlu Pemeliharaan
Filing Cabinet Besi	58	5		63	Perlu Pemeliharaan
Filing Cabinet Kayu	1			1	Perlu Pemeliharaan
Generator	11			11	Perlu Pemeliharaan
Gordyin/Kray	4			4	Perlu Pemeliharaan
Jam Mekanis	1			1	Perlu Pemeliharaan
Jaringan Distribusi Lain-lain	5			5	Perlu Pemeliharaan
Kardex Kayu	1			1	Perlu Pemeliharaan
Kasur/Spring Bed	20			20	Perlu Pemeliharaan
Kipas Angin	36		11	47	Perlu Pengadaan
Kitchen Set	2			2	Perlu Pemeliharaan
Kompor Gas (Alat Dapur)	16			16	Perlu Pemeliharaan
Kursi Besi/Metal	54			54	Perlu Pemeliharaan
Kursi Biasa	94	17		111	Perlu Pemeliharaan
Bangku tunggu	1			1	Perlu Pemeliharaan
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4			4	Perlu Pemeliharaan
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2	Perlu Pemeliharaan
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5			5	Perlu Pemeliharaan
Kursi Kayu	52	3		55	Perlu Pemeliharaan
Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2			2	Perlu Pemeliharaan
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	115			115	Perlu Pemeliharaan
Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	1			1	Perlu Pemeliharaan
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	22			22	Perlu Pemeliharaan
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	22			22	Perlu Pemeliharaan
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	49			49	Perlu Pemeliharaan
Kursi Kerja Pejabat lainnya	19			19	Perlu Pemeliharaan
Kursi Lipat	255			255	Perlu Pemeliharaan
Kursi Putar	26			26	Perlu Pemeliharaan
Kursi Rapat	775	30		805	Perlu Pemeliharaan
Kursi Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	8			8	Perlu Pemeliharaan

Nama Aset Barang	KONDISI			Jumlah	Keterangan
	Baik	Kurang Baik	Rusak		
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	22			22	Perlu Pemeliharaan
Kursi Tamu	17			17	Perlu Pemeliharaan
Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2			2	Perlu Pemeliharaan
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	24			24	Perlu Pemeliharaan
Lambang Garuda Pancasila	6			6	Perlu Pemeliharaan
Lemari Besi/Metal	60	10		70	Perlu Pemeliharaan
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	16			16	Perlu Pemeliharaan
Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1			1	Perlu Pemeliharaan
Lemari Es	21		3	24	Perlu Pengadaan
Lemari Kaca	24			24	Perlu Pemeliharaan
Lemari Kayu	78	4		82	Perlu Pemeliharaan
Lemari Makan	5			5	Perlu Pemeliharaan
Lemari Sorok	15	2		17	Perlu Pemeliharaan
Lensa Kamera	4			4	Perlu Pemeliharaan
Line Printer	2			2	Perlu Pemeliharaan
Meja 1/2 Biro	70	2		72	Perlu Pemeliharaan
Meja Bundar	22			22	Perlu Pemeliharaan
Meja Kerja	4			4	Perlu Pemeliharaan
Meja Kerja Kayu	68	2		70	Perlu Pemeliharaan
Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	3			3	Perlu Pemeliharaan
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	36	2		38	Perlu Pemeliharaan
Meja Kerja Pejabat Eselon II	9			9	Perlu Pemeliharaan
Meja Kerja Pejabat Eselon III	12			12	Perlu Pemeliharaan
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	35			35	Perlu Pemeliharaan
Meja Kerja Pejabat lain-lain	8			8	Perlu Pemeliharaan
Meja Komputer	14			14	Perlu Pemeliharaan
Meja Makan Besi	26	2		28	Perlu Pemeliharaan
Meja Panjang	7			7	Perlu Pemeliharaan
Meja Rapat	119			119	Perlu Pemeliharaan
Meja Rapat Pejabat Eselon III	1			1	Perlu Pemeliharaan
Meja Rapat Pejabat lainnya	2			2	Perlu Pemeliharaan
Meja Resepsionis	2			2	Perlu Pemeliharaan
Meja Tambahan	10			10	Perlu Pemeliharaan
Meja Tamu Biasa	6			6	Perlu Pemeliharaan
Meja Telepon	4	1		5	Perlu Pemeliharaan
Mesin Cuci	9			9	Perlu Pemeliharaan
mesin ketik lainnya (dst)	2			2	Perlu Pemeliharaan
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)		2		2	Perlu Pemeliharaan
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	4			4	Perlu Pemeliharaan
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)		1		1	Perlu Pemeliharaan

Nama Aset Barang	KONDISI			Jumlah	Keterangan
	Baik	Kurang Baik	Rusak		
Mesin Pemotong Rumput	7			7	Perlu Pemeliharaan
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	6			6	Perlu Pemeliharaan
Meubeler lainnya	46			46	Perlu Pemeliharaan
Mimbar/Podium	11			11	Perlu Pemeliharaan
Oven Listrik	1			1	Perlu Pemeliharaan
Pahatan Kayu	23			23	Perlu Pemeliharaan
Papan Tulis	1			1	Perlu Pemeliharaan
peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	5			5	Perlu Pemeliharaan
pompa lainnya (dst)	3			3	Perlu Pemeliharaan
Pompa Air	34			34	Perlu Pemeliharaan
Portable Water Pump	24			24	Perlu Pemeliharaan
Rak Besi	56			56	Perlu Pemeliharaan
Rak Kayu	17	6		23	Perlu Pemeliharaan
Rice Cooker (Alat Dapur)	6			6	Perlu Pemeliharaan
Seket Mat	2			2	Perlu Pemeliharaan
Sice	30			30	Perlu Pemeliharaan
Sofa	36			36	Perlu Pemeliharaan
Tabung Gas	6			6	Perlu Pemeliharaan
Tangga Aluminium	10			10	Perlu Pemeliharaan
Tempat Tidur Besi	1			1	Perlu Pemeliharaan
Tempat Tidur Kayu	12	1		13	Perlu Pemeliharaan
Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	1			1	Perlu Pemeliharaan
Tugu Peringatan Lainnya		5		5	Perlu Pemeliharaan
Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	1			1	Perlu Pemeliharaan

Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, Data diolah

Berdasarkan Tabel 2.5, beberapa barang di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mengalami rusak. Namun telah ada pengadaan dan penambahan barang guna mendukung tugas, fungsi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam kaitannya pengadaan Barang Milik Daerah.

Dukungan sarana prasarana yang ada di Sekretariat Daerah tahun 2025 sudah sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi. Pemenuhan kebutuhan perlu untuk dicukupi sampai 5 tahun kedepan untuk mendukung kinerja Sekretariat Daerah antara lain:

- 1) Kondisi *software* dan *hardware* perangkat pendukung kerja berupa laptop dan PC. Komputer perlu disesuaikan dengan

perkembangan teknologi informasi 5.0.

- 2) Sarana AC perlu penggantian dan perawatan berkala.
- 3) Kendaraan bermotor perlu ditambah dan perawatan berkala.
- 4) Bangunan Gedung perlu penambahan ruang, pemeliharaan dan perawatan berkala.

C. Teknologi Informasi

Pada era digital saat ini teknologi berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi ini dimanfaatkan dengan membuat sistem informasi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan. Sistem informasi yang ada di Sekretariat Daerah adalah:

1. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan yang diampu Bagian Administrasi Pembangunan;
2. Sistem Informasi Manajemen lainnya (*E-Letter* dan SKM) yang diampu Bagian Organisasi.
3. Bagian Hukum membuat *website*: jdih.kebumenkab.go.id yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN). JDIHN memudahkan dalam mencari aturan perundang-undangan yang dibutuhkan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen periode Renstra Sekretariat Daerah 2021-2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen 2021-2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tar get NSP K	Tar get IKK	Target Indika tor lainny a	Satu an	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN						PERSENTASE CAPAIAN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	22
	Indikator Tujuan																						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Inde ks	82,50	83	84	85	85,5	86	84,02	87,69	89,23	90,38	90,51	-	101,84	105,65	106,23	106,33	105,86	-
	Indikator Sasaran																						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Inde ks	82,50	83	84	85	85,5	86	86,27	86,53	89,57	90,40	86,81	-	104,57	104,25	106,63	106,35	101,53	-
b.	Tingkat Kemiskinan	-	-	-	%	16,85	16,00 - 17,00	15,00 - 16,00	14,00 - 15,00	13,50 - 14,00	13,00 - 13,50	17,83	16,43	16,34	15,71	13,58	-	94,50	103,47	97,92	95,48	103,09	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator lainnya	Satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN						PERSENTASE CAPAIAN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
c.	Pertumbuhan Ekonomi	-	-	-	%	3,96	4,05-5,53	5,00-5,5	5,00-5,5	5,00-5,5	5,00-5,5	3,71	5,79	5,66	5,30	5,30	-	91,60	115,80	113,20	106	106	-
d.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen 2021-2026

Berdasarkan Tabel 2.6 capaian kinerja indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2025 mengalami kenaikan signifikan tiap tahunnya. Hal ini menandakan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berjalan baik dan berhasil meningkatkan upaya transparansi dan efisiensi kinerja Perangkat Daerah. Pada indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan nilai IKM dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah berhasil mempertahankan WTP capaian kinerja dari tahun 2021-2025*.

Tabel 2.7
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Program	Indikator Program	Target Tahun ke					Realisasi Tahun Ke					Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM Setda	81.97	83	84	85	85,5	86,27	86,53	89,57	90,40	91,08	Tercapai
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai EKPPD	>3	3,27	2,78	2,95	3,28	>3	2,61	3,29	3,27	3,27*	Tercapai
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	88	87	88	89,96	91	85,47	88,73	97,10	97,09	97,09*	Tercapai

Berdasarkan Tabel 2.7, Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagian besar indikator program mencapai target yang ditetapkan, seperti pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang menunjukkan kenaikan angka dari target tahunan. Meskipun terdapat penurunan dalam program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, namun secara keseluruhan target tetap tercapai. Hal ini menunjukkan program Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berjalan efektif.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan Pendanaan Pelayanan Setda 2021-2025

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Realisasi					Capaian Kinerja					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGA RAN	REALISA SI
		Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	%	%	%	%	%	%	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.132.415.000	32.657.090.000	33.648.591.000	38.127.840.000	39.244.480.223	24.958.818.365	31.053.837.831	32.548.265.115	34.676.870.975	25.823.346.715	88,72	95,09	96,73	90,95	65,80	8,84	2,56
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.233.632.000	18.853.335.000	19.491.495.000	20.512.282.000	20.225.767.000	16.655.628.737	18.406.936.270	18.998.588.558	18.754.922.665	15.839.565.258	86,60	97,63	97,47	91,43	78,31	1,31	-0,77
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	417.400.000	260.000.000	545.650.000	273.000.000	123.000.000	384.164.250	161.360.000	541.740.950	269.264.000	99.915.175	92,04	62,06	99,28	98,63	81,23	-8,19	16,14
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.392.713.000	1.805.000.000	3.351.930.000	5.907.470.000	1.393.620.000	1.250.696.451	1.710.070.139	3.320.972.741	4.826.172.914	2.864.420.317	89,80	94,74	99,08	81,70	205,54	28,78	33,90
	Pengadaan	786.68	2.178.1	1.053.0	2.180.9	575.00	763.72	2.149.7	1.000.6	2.126.7	990.36	97,08	98,70	95,02	97,51	172,24	39,67	46,78

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Realisasi					Capaian Kinerja					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGA RAN	REALISA SI
		Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	%	%	%	%	%	%	%
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000	00.000	86.000	50.000	0.000	8.800	15.918	06.750	47.640	8.361							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.690.495.000	2.294.263.000	2.180.919.000	2.576.263.000	2.834.999.000	1.579.220.044	2.886.216.461	2.050.764.337	2.328.036.020	2.269.263.615	93,42	125,80	94,03	90,36	80,04	14,74	16,20
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	2.744.857.000	4.409.257.000	4.510.340.000	3.277.716.000	2.369.040.000	2.512.948.814	3.972.630.725	4.287746.345	3.144.745.460	1.302.558.959	91,55	90,10	95,06	95,94	54,98	1,97	-4,80
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	896.115.000	989.847.000	1.147.194.000	1.237.194.000	1.142.194.000	887.966.483	942.387.831	1.019.056.641	1.106.496.010	969.602.979	99,09	95,21	88,83	89,44	84,89	6,63	2,62
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	620.000.000	785.863.000	883.645.000	1.043.701.000	777.500.000	568,996.801	780.310.676	869.286.492	1.027.271.023	668.719.327	91,77	99,29	98,38	98,43	86,01	7,95	7,95

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Realisasi					Capaian Kinerja					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGA RAN	REALISA SI
		Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	%	%	%	%	%	%	%
	Penataan Organisasi	334.55 0.000	556.50 0.000	336.40 0.000	375.51 8.000	319.00 0.000	328.07 6.577	551.21 0.528	332.70 2.777	372.42 8.649	211.51 4.275	98,07	99,05	98,90	99,18	66,31	5,84	-0,72
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	425.97 2.000	524.92 5.000	670.58 2.000	745.74 6.000	572.28 6.000	405.24 0.908	492.99 9.346	655.30 3.674	720.78 5.694	607.41 8.449	95,13	93,92	97,72	96,65	106,14	9,73	12,21
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.548.447.000	10.868.634.000	23.446.762.000	34.158.774.800	18.469.393.000	4.240.413.559	10.609.284.329	22.667.281.813	31.466.523.018	10.497.059.389	93,23	97,61	96,68	92,12	56,83	63,61	59,01
	Administrasi Tata Pemerintahan	892.45 9.000	384.00 0.000	1.303.2 10.000	450.91 8.800	424.05 9.000	843.97 5.703	379.21 7.023	1.324.9 21.195	448.49 9.339	332.25 2.648	94,57	98,75	101,67	99,46	78,35	-32,08	-36,78
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.152.0 50.000	9.923.0 00.000	21.675. 295.00 0	33.337. 644.00 0	17.534. 261.00 0	44.897. 250	9.681.1 30.610	20.953. 862.98 0	30.521. 711.48 8	9.940.4 61.891	1,42	97,56	96,67	91,55	56,69	84,91	5389,38
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	453.34 9.000	526.63 4.000	441.27 7.000	343.18 2.000	458.97 2.000	424.75 3.441	514.64 7.946	388.49 7.638	334.62 6.679	224.34 4.850	93,69	97,72	88,04	97,51	48,88	2,87	-12,54
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	50.589. 000	35.000. 000	24.980. 000	27.030. 000	52.101. 000	44.897. 250	34.288. 750	24.808. 642	26.685. 512	0	88,75	97,97	99,31	98,73	0,00	10,38	-35,93
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.373.146.000	2.206.039.000	1.996.133.000	1.565.899.000	1.675.583.000	2.201.206.974	514.647.946	1.916.207.801	1.481.852.876	999.675.617	92,75	23,33	96,00	94,63	59,66	-7,78	35,13

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Realisasi					Capaian Kinerja					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGA RAN	REALISA SI
		Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	Rp. 000,-	%	%	%	%	%	%	%
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	494.753.000	326.868.000	175.480.000	175.480.000	175.480.000	449.330.100	320.824.537	120.722.190	174.831.793	203.948.401	90,82	98,15	68,80	99,63	116,22	-20,06	-7,37
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	231.701.000	310.000.000	200.260.000	160.453.000	195.340.000	227,839.930	306.088.957	198.337.920	158.197.607	122.869.713	98,33	98,74	99,04	98,59	62,90	0,06	-10,86
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.102.215.000	1.268.000.000	767.060.000	848.321.00	919.000.000	1.023.259.450	1.132.616.672	701.465.017	772.483.108	394.831.382	92,84	89,32	91,45	91,06	42,96	-1,38	-16,54
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	134.477.000	301.171.000	330.683.000	381.645.000	385.763.000	122.927.994	295.311.700	322.630.733	376,340.368	278.026.121	91,41	98,05	97,56	98,61	72,07	37,56	35,00

Keterangan : Realisasi tahun 2025 terhitung sampai dengan Triwuln II.

Sumber : Realiasi Anggaran Setda Kabupaten Kebumen 2021-2025

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Berikut merupakan Sasaran Layanan dari seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen beserta kelompok sasaran layanan.

Tabel 2.9
Sasaran Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

No.	Bagian	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Bagian Umum	• Permohonan Bantuan Operasional (BOP) KDH/WKDH • Pelayanan Surat Menyurat • Permohonan Peminjaman Gedung	• Pimpinan dan Pegawai Setda • Perangkat Daerah • Masyarakat • Instansi Vertikal • Perguruan Tinggi / Sekolah • Lembaga / Instansi terkait
2.	Bagian Pemerintahan	• Layanan Kerja Sama Dalam Negeri • Fasilitasi pengelolaan dana kelurahan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan • Fasilitasi toponimi/pembakuan Nama Rupabumi (NR) dan pemetaan wilayah • Fasilitasi batas wilayah kecamatan dan batas wilayah desa/kelurahan • Koordinasi batas wilayah antar daerah/kabupaten • Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah • Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Daerah • Fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif • Fasilitasi pembentukan Kawasan khusus bencana • Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang adminduk & capil, ketentraman dan ketertiban umum serta	• Pimpinan dan Pegawai Setda • Perangkat Daerah • Masyarakat • Instansi vertikal • Perguruan Tinggi / Sekolah • Lembaga / Instansi terkait

No.	Bagian	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		perlindungan Masyarakat dan pertanahan • Koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan otonomi daerah • Fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif • Fasilitasi pembentukan Kawasan khusus bencana • Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang adminduk & capil, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat dan pertanahan • Koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan otonomi daerah	
3.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	• Layanan Fasilitasi Haji • Layanan Fasilitasi MTQ • Layanan Fasilitasi Guru Ngaji • Layanan Fasilitasi Pondok Pesantren dan Lembaga Keagamaan • Pelayanan pencairan hibah kepada badan/lembaga yang bersifat nirlamaba dan berbadan hukum Indonesia • Fasilitasi mahasiswa KKN di Kabupaten Kebumen • Layanan Pencairan Hibah Uang	• Perangkat Daerah • Masyarakat • Tokoh Agama • Lembaga Sosial dan Keagamaan • Instansi vertikal • Pondok Pesantren • Perguruan Tinggi / Sekolah • Lembaga / Instansi terkait
4.	Bagian Administrasi Pembangunan	• Layanan Konsultasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	• Perangkat Daerah • Masyarakat • Instansi vertikal • Perguruan Tinggi / Sekolah • Lembaga / Instansi terkait
5.	Bagian Hukum	• Layanan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah • Layanan Fasilitasi Bantuan Hukum • Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	• Pimpinan dan Pegawai Setda • Perangkat Daerah • Masyarakat • Instansi vertikal • Perguruan Tinggi / Sekolah • Lembaga / Instansi terkait

No.	Bagian	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
6.	Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam	• Layanan Koordinasi Energi dan Pemanfaatan SDA • Layanan Koordinasi Pembinaan BUMD • Layanan Koordinasi Akselerasi Akses Keuangan dan Pengendalian Harga	• Perangkat Daerah • Masyarakat • Instansi vertikal • Perguruan Tinggi / Sekolah • Lembaga / Instansi terkait
7.	Bagian Organisasi	• Konsultasi Tatalaksana dan Pelayanan Publik • Konsultasi dan/atau Pendampingan Kelembagaan dan Analisis Jabatan • Konsultasi dan/atau Pendampingan Kinerja ASN dan Reformasi Birokrasi	• Pimpinan dan Pegawai Setda • Perangkat Daerah • Masyarakat • Instansi vertikal • Perguruan Tinggi / Sekolah • Lembaga / Instansi terkait
8.	Bagian Protokol Pimpinan	• Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah • Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Sambutan Bupati dan Wakil Bupati • Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Pendokumentasian Pimpinan	• Pimpinan dan Pegawai Setda • Perangkat Daerah • Masyarakat • Instansi vertikal • Perguruan Tinggi / Sekolah • Lembaga / Instansi terkait • Media Massa
9.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	• Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa • Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik • Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	• Perangkat Daerah • Masyarakat • Instansi vertikal • Perguruan Tinggi / Sekolah • Lembaga / Instansi terkait

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen adalah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan paradigma terhadap pemerintahan perlu diikuti dengan penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan transparan.
2. Tuntutan reformasi birokrasi dan semakin kritisnya masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah yang ditungkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Tuntutan akan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
4. Tuntutan kelembagaan daerah yang efektif dan efisien menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada.

Sedangkan peluang bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan modal bagi penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan transparan.
2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Adanya regulasi dari pusat yang jelas tentang kelembagaan perangkat daerah.

A. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dilihat potensi ASN di Sekretariat Daerah tahun 2025 sebanyak 159 pegawai dengan komposisi pendidikan paling tinggi adalah berpendidikan S1 sebanyak 63%. Sebanyak 82% ASN sudah bergolongan III ke atas. Hal ini menunjukkan kualitas dan kapasitas pegawai telah mendukung analisis beban kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah pemenuhan sarana-prasarana penunjang kinerja sudah memadai namun perlu penyesuaian *software* dan *hardware* perangkat pendukung kerja berupa laptop dan PC komputer dengan teknologi informasi 5.0. Hal ini digunakan untuk menyesuaikan perkembangan Teknologi Informasi yang sangat dinamis. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah permasalahan yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2025-2029 dapat diidentifikasi pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja	1. Masih rendahnya kualitas implementasi kebijakan pembangunan agar berjalan efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan	• Masih rendahnya kualitas perencanaan kebijakan pembangunan • Masih perlunya penguatan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam hal prioritas pembangunan. • Masih redahnya monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan sebagai dasar perbaikan kebijakan. • Masih rendahnya kualitas dokumentasi dan pelaporan kebijakan pembangunan sebagai bahan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan.
	2. Masih lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	• Masih rendahnya kualitas perencanaan kinerja yang sepenuhnya SMART • Masih rendahnya kualitas indikator kinerja hanya berfokus output, ukan mengukur manfaat dan dampak • Masih lemahnya tindak lanjut atas hasil evaluasi
	3. Masih kurangnya koordinasi dan sinergi antar PD	• Masih adanya ego sektoral sehingga program berjalan parsial • Belum optimalnya integrasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan
	4. Masih kurangnya pengendalian internal dan manajemen Risiko	• Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Belum optimalnya kepatuhan terhadap regulasi. • Belum optimalnya pengawasan internal yang efektif • Belum optimalnya implementasi Manajemen risiko bagian dari budaya organisasi
	5. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik berbasis evaluasi IKM	• Penyederhanaan prosedur dan standar pelayanan • Belum optimalnya kompetensi SDM pelayanan • Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi • Belum optimalnya penerapan IKM sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan
Masih rendahnya fasilitasi pondok pesantren dan lembaga keagamaan	Belum optimalnya dukungan pemerintah dalam fasilitasi pondok pesantren dan lembaga keagamaan	• Belum optimalnya dukungan fasilitasi legalitas pondok pesantren dan lembaga keagamaan • Belum optimalnya dukungan peningkatan kapasitas pondok pesantren dan lembaga keagamaan • Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pondok pesantren dan lembaga keagamaan

B. Telaah

1) Telaah Kementerian Dalam Negeri

Renstra Sekretariat Daerah diselaraskan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Renstra Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Tahun 2025-2029. Mendasari RPJMN Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, diketahui visi pada Kementerian Dalam Negeri adalah *“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri”*. Adapun misi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah

yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2029. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”* Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Astra Cita yaitu:

- Asta Cita 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- Asta Cita 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan

kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

- Asta Cita 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
- Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun

2025-2029 menunjukkan bahwa fokus pembangunan diarahkan pada penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, stabilitas politik dalam negeri, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta akselerasi reformasi birokrasi.

2) Telaah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Perangkat Gubernur serta pelayanan administratif.

Guna memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2024-2026 ditetapkan dua tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu **1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah** dan **2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.**

Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2024-2026 adalah: Tujuan pertama, Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah memiliki satu sasaran, yaitu: Meningkatkan Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil. Sedangkan Tujuan kedua, Kualitas

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki dua sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Kuaitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan
2. Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Sedangkan Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kebijakan daerah,
2. Penataan Birokrasi Biro Lingkup Sekretariat Daerah,
3. Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah,
4. Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah,
5. Pengembangan Jejaring Manajemen dan SDM yang Profesional, dan
6. Sinkronisasi Agenda Pembangunan.

3) Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi pada setiap tahapan penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah.

Terdapat sejumlah isu lingkungan yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, antara lain berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, serta

upaya pengurangan risiko bencana yang terkait dengan aspek lingkungan. Prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan tersebut diinternalisasikan ke dalam arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatan dalam Renstra, sehingga setiap pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja perangkat daerah, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga memiliki peran dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memastikan keberlanjutan dan keadilan bagi generasi mendatang.

4) Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Kebumen dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Maka visi dan misi pembangunan lima tahun mendatang harus berlandaskan pada visi dan misi Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah. Visi menggambarkan keadaan ideal yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode pembangunan, sedangkan misi menjadi arah dan fokus penyelenggaraan pembangunan serta program kerja selama masa kepemimpinan kepala daerah.

Keberadaan visi Kabupaten Kebumen memiliki peran penting karena menjadi pemersatu sekaligus pengintegrasikan berbagai aspek yang mendukung pembangunan daerah, yang pelaksanaannya melibatkan seluruh unsur, baik aparatus pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Berdasarkan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka Visi Kabupaten Kebumen untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

KEBUMEN BERDAYA

KEBUMEN BERIMAN - MAJU - SEJAHTERA –
BERBUDAYA

BERIMAN

Beriman mengandung arti memiliki keyakinan yang teguh terhadap keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Beriman diwujudkan dalam sikap, pengakuan melalui lisan dalam mengucapkan dan menyampaikan kebenaran iman dan pembuktian melalui perbuatan yakni dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan serta berakhlak baik sesuai nilai agama. Kebumen beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada

nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.

MAJU

Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, medudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.

SEJAHTERA

Kebumen Sejahtera adalah Kebumen sebagai kabupaten dimana masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sejahtera didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

BERBUDAYA

Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjadi jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Adil dan Inklusif.
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah.
3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi.
5. Mewujudkan masyarakat yang dami, guyub, rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.

Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya mengampu misi yang keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi aktual yang harus diperhatikan karena memiliki dampak signifikan di masa mendatang dan akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Isu strategis perlu diidentifikasi untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat, sehingga perangkat daerah mampu merespons dinamika lingkungan internal dan eksternal secara efektif. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Kemendagri, telaah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan telaah KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan kualitas implementasi kebijakan pembangunan agar berjalan efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan
2. Masih perlunya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
3. Masih perlunya koordinasi dan sinergi antar PD dan stakeholder dalam mewujudkan *Good Government*.
4. Masih perlunya pengendalian internal dan manajemen

Resiko

5. Masih perlunya kualitas pelayanan publik berbasis evaluasi IKM
6. Masih perlunya dukungan pemerintah dalam fasilitasi pondok pesantren dan lembaga keagamaan

Tabel 2.11
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.	- Masih rendahnya kualitas implementasi kebijakan pembangunan agar berjalan efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan - Masih lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Masih kurangnya koordinasi dan sinergi antar PD - Masih kurangnya pengendalian internal dan manajemen Resiko - Masih rendahnya kualitas pelayanan publik berbasis evaluasi IKM - Belum optimalnya dukungan pemerintah dalam fasilitasi pondok pesantren dan lembaga keagamaan	- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan - Belum optimalnya integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan dokumen perencanaan daerah - Belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan rekomendasi KLHS	- Geopolitik dan geoekonomi - Perkembangan teknologi industri 5.0 - Dampak perubahan iklim global	- Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah - Rendahnya produktivitas - Resiliensi dan proyek perekonomian yang positif - Potensi sumber daya manusia dan modal manusia	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	- Masih perlunya peningkatan kualitas implementasi kebijakan pembangunan agar berjalan efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan - Masih perlunya peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Masih perlunya koordinasi dan sinergi antar PD dan stakeholder dalam mewujudkan <i>Good Government</i>. - Masih perlunya pengendalian internal dan manajemen Resiko - Masih perlunya kualitas pelayanan publik berbasis evaluasi IKM - Masih perlunya dukungan pemerintah dalam fasilitasi pondok pesantren dan lembaga keagamaan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029: “Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja dan Meningkatkan fasilitasi pesantren dan Lembaga pendidikan keagamaan”.

Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan daerah.
2. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dan akses keuangan daerah.
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik daerah.
4. Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan
5. Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana dan prasarana
6. Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas

Tabel 3.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD				Renstra Perangkat Daerah		
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi Ke -4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni,ngayomi, dan ngayemi						
	Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan		Indeks Reformasi Birokrasi			
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP			
				Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja dan Meningkatkan fasilitasi		Nilai EKPPD (Nilai)
						Indeks Fasilitasi Keagamaan (Indeks)

RPJMD				Renstra Perangkat Daerah		
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan		
					Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan daerah	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)
					Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dan akses keuangan daerah	Indeks kualitas kebijakan pembangunan (Indeks)
						Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)
					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)
					Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan (%)
					Meningkatnya pesantren dan	Persentase Pesantren dan Pendidikan

RPJMD				Renstra Perangkat Daerah		
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
					pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas	Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas (%)
					Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana dan prasarana	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana (%)

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD selanjutnya menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah. Pada Renstra Sekretariat Daerah, tujuan pembangunan daerah diterjemahkan ke dalam tujuan Sekretariat Daerah yang kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi sasaran Sekretariat Daerah. Dengan mengacu pada tugas dan fungsi sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta peran Setda dalam mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, dan outcome pembangunan Kabupaten Kebumen, maka disusun tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Setda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja dan Meningkatkan fasilitasi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan		Nilai EKPPD (Nilai)	3,28	3,29	3,31	3,32	3,33	3,34	
			Indeks Fasilitasi Keagamaan (Indeks)	-	7,40	8,29	9,02	9,66	10,36	
		1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan daerah	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	98,53	98,54	98,55	98,56	98,57	98,58	
		2. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dan akses keuangan daerah	Indeks kualitas kebijakan pembangunan (Indeks)	90,40	90,70	91,00	92,00	93,00	94,00	
			Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4,78	4,79	4,81	4,83	4,85	4,86	
		3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90,77	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
		4. Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan (%)	-	7,13	9,52	12,57	16,55	22,63	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		5. Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas (%)	5,44	6,50	7,00	7,31	7,45	7,48	
		6. Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana dan prasarana	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana (%)	-	14,88	17,35	19,16	20,38	21,13	

3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Untuk mendukung Strategi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dan pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dijabarkan strategi pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Setda Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Menyelaraskan peran dan fungsi Sekretariat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Kebumen melalui penajaman tujuan, sasaran, dan indikator kinerja, serta memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran.	Peningkatan penataan struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta penyederhanaan proses bisnis guna meningkatkan efektivitas koordinasi, fasilitasi, dan administrasi pemerintahan.	Mengoptimalkan penerapan SPBE, memperkuat implementasi SAKIP dan SPIP, serta meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang berorientasi hasil.	Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi pengawasan, serta melakukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja
Menyusun dan menyelaraskan kebijakan fasilitasi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan dengan dokumen perencanaan daerah.	Memperkuat peran pemerintah daerah dalam koordinasi, fasilitasi, dan kemitraan dengan pesantren, lembaga pendidikan keagamaan, serta pemangku kepentingan terkait guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif.	Peningkatan dukungan fasilitasi melalui bantuan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas pengelola dan pendidik, serta pendampingan administratif dan kelembagaan.	Peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan fasilitasi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.	Meningkatnya fasilitasi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	• Penerapan <i>e-government</i> untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik. • Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi • Perwujudan ketertiban, keamanan, dan kerukunan masyarakat berbasis kondusivitas wilayah	• Peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah a. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang sepenuhnya SMART b. Peningkatan kualitas indikator kinerja yang tidak hanya berfokus output, ukan mengukur mengukur manfaat dan dampak c. Peningkatan tindak lanjut atas hasil evaluasi • Peningkatan koordinasi dan sinergi antar PD dan stakeholder dalam mewujudkan Good Goverment. a. Pengurangan ego sektoral sehingga program

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(1)	(2)	(3)	(4)
			berjalan parsial b. Peningkatan integrasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan • Peningkatan kualitas implementasi kebijakan pembangunan agar berjalan efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan a. Peningkatan kualitas perencanaan kebijakan pembangunan b. Penguatan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam hal prioritas pembangunan. c. Peningkatan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan sebagai dasar perbaikan kebijakan. d. Peningkatan kualitas dokumentasi dan pelaporan kebijakan pembangunan sebagai bahan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan. • Peningkatan pengendalian internal dan manajemen Resiko a. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) b. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. c. Peningkatan pengawasan internal yang efektif d. Peningkatan implementasi Manajemen risiko bagian dari budaya organisasi • Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis evaluasi IKM a. Penyederhanaan prosedur dan standar pelayanan b. Peningkatan kompetensi SDM pelayanan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(1)	(2)	(3)	(4)
			c. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi d. Peningkatan penerapan IKM sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan • Peningkatan dukungan pemerintah dalam fasilitasi pondok pesantren dan lembaga keagamaan a. Peningkatan dukungan fasilitasi legalitas pondok pesantren dan lembaga keagamaan b. Penguatan dukungan dalam peningkatan kapasitas pondok pesantren dan lembaga keagamaan c. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pondok pesantren dan lembaga keagamaan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Program Perekonomian dan Pembangunan.

Tabel 4.1

Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Administrasi Keuangan Perangkat	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Penyediaan Bahan/Material

		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
9	Penataan Organisasi	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi	1. Fasilitasi Keprotokolan 2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
11	Administrasi Tata Pemerintahan	1. Penataan Administrasi Pemerintahan 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
12	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 2. Fasilitasi Bantuan Hukum 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
14	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan

		Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
C	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
15	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
16	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
17	Administrasi Pembangunan	1. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2025

Secara keseluruhan, pelaksanaan program Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas koordinasi dan pelayanan administratif, mempercepat transformasi digital, serta membangun birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Dengan implementasi program yang konsisten dan sinergis, Sekretariat Daerah diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas, serta mendukung terwujudnya Kabupaten Kebumen yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari

keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Secara garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen mencakup 18 kegiatan dan 53 sub kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperbaiki sistem administrasi, serta mendorong transformasi digital di lingkungan birokrasi pemerintah daerah

Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dijelaskan secara rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				54.600.88 5.052		51.027.284 .297		66.830.299 .885		68.084.872 .394		53.843.329 .382	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				33.382.03 1.052		32.282.930 .297		33.037.945 .885		34.080.018 .394		34.727.475 .382	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,60	72,64	33.382.031 .052	72,66	32.282.930. 197	72,68	21.884.217. 676	72,70	34.080.018. 394	72,72	34.727.475. 382	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	90,40	90,40		90,45		90,50		90,55	90,60			
4.01.02 - PROGRAM				19.675.00		17.172.000		32.202.000		32.334.000		17.388.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				0.000		.000		.000		.000		.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)	67,84	70,00	19.675.000. .000	73,00	17.172.000. 000	73,00	32.202.000. 000	75,00	32.334.000. 000	75,00	17.388.000. 000	
	Indeks Zakat Nasional (Indeks)	0,53	0,59		0,62		0,65		0,68		0,71		
	Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah (%)	100,0 0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1.543.854. .000		1.572.354. 000		1.590.354. 000		1.670.854. 000		1.727.854. 000	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	84,35	84,37	1.543.854. 000	84,39	1.572.354.0 00	84,41	1.590.354.0 00	84,43	1.670.854.0 00	84,45	1.727.854.0 00	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2025

Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja dan Meningkatkan fasilitasi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan				Nilai EKPPD (Nilai)		
					Indeks Fasilitasi Keagamaan (Indeks)		
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan daerah			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dan akses keuangan daerah			Indeks kualitas kebijakan pembangunan (Indeks)		
					Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
		Meningkatnya pesantren dan			Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
		pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan			mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan (%)		
		Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas			Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas (%)		
		Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana dan prasarana			Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana (%)		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)		
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan tepat waktu (Dengan Satuan:bulan)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Keuangan SKPD (Dokumen)		
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dengan Satuan:bulan)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:bulan)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:paket)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:bulan)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH (Dengan Satuan:bulan)	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Satuan:Orang/Bulan)		
				Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang)	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi	Jumlah dokumen fasilitas penataan organisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	Penataan Organisasi	
				Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dengan Satuan:Dokumen)	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Laporan)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
				Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Dokumen)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian layanan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan (Dengan Satuan:layanan)	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Dengan Satuan:Laporan)	Fasilitasi Keprotokolan	
				Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Indeks Zakat Nasional (IZN) (Indeks)		
					Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah (%)		
				Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang disusun tepat waktu (Dengan Satuan:Dokumen)	Administrasi Tata Pemerintahan	
				Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dengan Satuan:Dokumen)	Penataan Administrasi Pemerintahan	
				Terlaksananya Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil	Pengelolaan Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dengan Satuan:Dokumen)	Kewilayahan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Dokumen)	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapatkan fasilitasi anggaran (Dengan Satuan:Lembaga)		
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:Lembaga)		
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapatkan fasilitasi pendampingan (Dengan Satuan:Lembaga)		
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
				Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dengan Satuan:Dokumen)		
				Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dengan Satuan:Dokumen)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
				Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Dengan Satuan:Persen)	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Dengan Satuan:Kasus)	Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dengan Satuan:Dokumen)	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Capaian Fasilitasi kerja sama daerah yang disepakati (Dengan Satuan:Dokumen)	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dengan	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Satuan:Dokumen)		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Daerah		Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Capaian Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Laporan)	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
				Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Return on Aset (ROA) BUMD (Dengan Satuan:Persen)		
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dengan Satuan:Dokumen)	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
				Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan (Dengan Satuan:Dokumen)	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
				Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
				Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Pelaksanaan Pembangunan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	Pembangunan	
				Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Layanan Pengadaan (Dengan Satuan:Laporan)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Dokumen)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Orang)	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Laporan)	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dengan Satuan:Dokumen)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo,	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Persandian	Perhubungan, Statistik, Persandian (Dengan Satuan:Dokumen)		
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dengan Satuan:Dokumen)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

4.2 Uraian Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Program dan kegiatan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Uraian Subkegiatan yang menjelaskan hingga kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 4
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Kebumen

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				54.600.885.052		51.027.284.297		66.830.299.885		68.084.872.394		53.843.329.382		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A				33.382.031.052		32.282.930.297		33.037.945.885		34.080.018.394		34.727.475.382		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,60	72,64	33.382.031.052	72,66	32.282.930.297	72,68	33.037.945.885	72,70	34.080.018.394	72,72	34.727.475.382	4.01.0.00. 0.00.01.0 000 - SEKRETA RIAT DAERAH	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	90,40	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60			
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20.518.302.843		21.159.702.088		21.884.217.676		22.662.290.185		23.199.747.173		
Terlaksananya Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perangkat Daerah	keuangan perangkat daerah yang disediakan tepat waktu (Dengan Satuan:bulan)													
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.392.752.692		21.031.751.914		21.754.844.019		22.529.594.595		23.066.785.504		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bu lan)	161	161	20.392.752.692	161	21.031.751.914	161	21.754.844.019	161	22.529.594.595	161	23.066.785.504		
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD				125.550.151		127.950.174		129.373.657		132.695.590		132.961.669		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	125.550.151	4	127.950.174	4	129.373.657	4	132.695.590	4	132.961.669		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				175.000.000		179.000.000		183.000.000		191.000.000		191.000.000		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyedia an administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	175.000.000	12	179.000.000	12	183.000.000	12	191.000.000	12	191.000.000		
4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				25.000.000		27.000.000		29.000.000		33.000.000		33.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	4	4	25.000.000	6	27.000.000	4	29.000.000	4	33.000.000	4	33.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)													
4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		52.000.000		54.000.000		58.000.000		58.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	10	10	50.000.000	10	52.000.000	10	54.000.000	10	58.000.000	10	58.000.000		
4.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Dengan Satuan:Orang)	300	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.130.000.000		2.140.000.000		3.270.000.000		2.171.000.000		2.171.000.000		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	2.130.000.000	12	2.140.000.000	12	3.270.000.000	12	2.171.000.000	12	2.171.000.000		
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		102.000.000		150.000.000		108.000.000		108.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	100.000.000	4	102.000.000	4	104.000.000	4	108.000.000	4	108.000.000		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	950.000.000	12	950.000.000	4	950.000.000	4	950.000.000	4	950.000.000		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		42.000.000		44.000.000		48.000.000		48.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	40.000.000	4	42.000.000	4	44.000.000	4	48.000.000	4	48.000.000		
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				35.000.000		37.000.000		39.000.000		43.000.000		43.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	35.000.000	12	37.000.000	1	39.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000		
4.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				35.000.000		37.000.000		39.000.000		44.000.000		44.000.000		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	4	4	35.000.000	4	37.000.000	4	39.000.000	4	44.000.000	4	44.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)													
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	375	300	950.000.000	12	950.000.000	300	950.000.000	300	950.000.000	300	950.000.000		
4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		20.000.000		24.000.000		28.000.000		28.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	24.000.000	1	28.000.000	1	28.000.000		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.600.000.000		630.000.000		657.000.000		760.000.000		810.000.000		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Paket)	64	12	2.600.000.000	12	630.000.000	12	657.000.000	12	760.000.000	12	810.000.000		
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000		103.000.000		105.000.000		110.000.000		110.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	5	100.000.000	5	103.000.000	5	105.000.000	5	110.000.000	5	110.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				300.000.000		300.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	6	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	325.000.000	15	350.000.000		
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.200.000.000		250.000.000		252.000.000		325.000.000		350.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	30	2.200.000.000	30	250.000.000	30	252.000.000	30	325.000.000	30	350.000.000		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.912.332.809		2.969.832.809		2.978.332.809		2.996.332.809		2.998.332.809		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:bulan)	12	12	2.912.332.809	12	2.969.832.809	12	2.978.332.809	12	2.996.332.809	12	2.998.332.809		
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000		8.500.000		10.000.000		14.000.000		14.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	8.000.000	12	8.500.000	12	10.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa				1.250.000.000		1.255.000.000		1.260.000.000		1.270.000.000		1.272.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	1.250.000.000	12	1.255.000.000	12	1.260.000.000	12	1.270.000.000	12	1.272.000.000		
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		62.000.000		64.000.000		68.000.000		68.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	60.000.000	12	62.000.000	12	64.000.000	12	68.000.000	12	68.000.000		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.594.332.809		1.644.332.809		1.644.332.809		1.644.332.809		1.644.332.809		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	1.594.332.809	12	1.644.332.809	12	1.644.332.809	12	1.644.332.809	12	1.644.332.809		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.570.000.000		1.657.000.000		1.629.000.000		1.663.000.000		1.667.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang	127	126	1.570.000.000	126	1.657.000.000	126	1.629.000.000	126	1.663.000.000	126	1.667.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan Daerah	urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Unit)													
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				900.000.000		910.000.000		920.000.000		940.000.000		942.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	109	113	900.000.000	113	910.000.000	113	920.000.000	113	940.000.000	113	942.000.000		
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		115.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	3	20	100.000.000	20	105.000.000	20	110.000.000	20	115.000.000	20	115.000.000		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000		72.000.000		74.000.000		78.000.000		78.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	7	25	70.000.000	25	72.000.000	25	74.000.000	25	78.000.000	25	78.000.000		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				500.000.000		570.000.000		525.000.000		530.000.000		532.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	7	4	500.000.000	4	570.000.000	4	525.000.000	4	530.000.000	4	532.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)													
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.596.395.400		1.596.395.400		1.596.395.400		1.596.395.400		1.598.395.400		
Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH (Dengan Satuan:bulan)	12	12	1.596.395.400	12	1.596.395.400	12	1.596.395.400	12	1.596.395.400	12	1.598.395.400		
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				664.395.400		200.000.000		664.395.400		664.395.400		664.395.400		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	2	2	664.395.400	2	664.395.400	2	664.395.400	2	664.395.400	2	664.395.400		
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		202.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	202.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Dengan Satuan:Paket)													
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang)	8	4	6.000.000	2	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000		
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				726.000.000		726.000.000		726.000.000		726.000.000		726.000.000		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bu lan)	7	4	726.000.000	12	726.000.000	4	726.000.000	4	726.000.000	4	726.000.000		
4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				900.000.000		920.000.000		940.000.000		960.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Satuan:bulan)	12	12	900.000.000	12	920.000.000	12	940.000.000	12	960.000.000	12	1.000.000.000		
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				650.000.000		660.000.000		670.000.000		680.000.000		700.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	650.000.000	12	660.000.000	12	670.000.000	12	680.000.000	12	700.000.000		
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				250.000.000		260.000.000		270.000.000		280.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	250.000.000	12	260.000.000	12	270.000.000	12	280.000.000	12	300.000.000		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				355.000.000		364.000.000		370.000.000		401.000.000		407.000.000		
Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen fasilitasi penataan organisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	355.000.000	3	364.000.000	3	370.000.000	3	401.000.000	3	407.000.000		
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				80.000.000		112.000.000		114.000.000		124.000.000		125.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	80.000.000	1	112.000.000	1	114.000.000	1	124.000.000	1	125.000.000		
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				200.000.000		155.000.000		157.000.000		167.000.000		170.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	200.000.000	1	155.000.000	1	157.000.000	1	167.000.000	1	170.000.000		
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				75.000.000		97.000.000		99.000.000		110.000.000		112.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	75.000.000	1	97.000.000	1	99.000.000	1	110.000.000	1	112.000.000		
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				625.000.000		644.000.000		650.000.000		679.000.000		685.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian layanan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan (Dengan Satuan:Layanan)	8	8	625.000.000	8	644.000.000	8	650.000.000	8	679.000.000	8	685.000.000		
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan				370.000.000		375.000.000		377.000.000		388.000.000		390.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	370.000.000	3	375.000.000	3	377.000.000	3	388.000.000	3	390.000.000		
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				140.000.000		142.000.000		144.000.000		153.000.000		155.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	140.000.000	2	142.000.000	2	144.000.000	2	153.000.000	2	155.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				115.000.000		127.000.000		129.000.000		138.000.000		140.000.000		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	115.000.000	3	127.000.000	3	129.000.000	3	138.000.000	3	140.000.000		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				19.675.000.000		17.172.000.000		32.202.000.000		32.334.000.000		17.388.000.000		
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)	67,84	70,00	19.675.000.000	73,00	17.172.000.000	73,00	32.202.000.000	75,00	32.334.000.000	75,00	17.388.000.000	4.01.0.00. 0.00.01.0 000 - SEKRETA RIAT DAERAH	
	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Indeks)	0,53	0,59		0,62		0,65		0,68		0,71			
	Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				410.000.000		416.000.000		422.000.000		456.000.000		495.000.0000		
Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang disusun tepat waktu (Dengan Satuan:Dokumen)	3	5	410.000.000	5	416.000.000	5	422.000.000	5	456.000.000	5	495.000.0000		
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				80.000.000		82.000.000		84.000.000		93.000.000		95.000.000		
Terlaksananya Penataan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	1	1	80.000.000	1	82.000.000	1	84.000.000	1	93.000.000	1	95.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan	Pemerintahan (Dengan Satuan:Dokumen)													
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				80.000.000		82.000.000		84.000.000		93.000.000		95.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	80.000.000	2	82.000.000	2	84.000.000	2	93.000.000	2	95.000.000		
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				250.000.000		252.000.000		254.000.000		270.000.000		305.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	250.000.000	2	252.000.000	2	254.000.000	2	270.000.000	2	305.000.000		
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				18.700.000.000		16.180.000.000		31.196.000.000		31.255.000.000		16.265.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Dokumen)	15	16	18.700.000.000	16	16.180.000.000	16	31.196.000.000	16	31.255.000.000	16	16.265.000.000		
	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapatkan fasilitasi anggaran (Dengan Satuan:Lembaga)	NA	229		291		353		415		477			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas (Dengan Satuan:Lembaga)	NA	87		89		89		91		91			
	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapatkan fasilitas pendampingan (Dengan Satuan:Lembaga)	NA	123		153		183		213		245			
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				17.550.000.000		15.020.000.000		30.030.000.000		30.060.000.000		15.070.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	17.550.000.000	5	15.020.000.000	5	30.030.000.000	5	30.060.000.000	5	15.070.000.000		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				400.000.000		405.000.000		407.000.000		420.000.000		420.000.000		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,	7	7	400.000.000	7	405.000.000	7	407.000.000	7	420.000.000	7	420.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dengan Satuan:Dokumen)													
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				750.000.000		755.000.000		759.000.000		775.000.000		775.000.000		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	750.000.000	4	755.000.000	4	759.000.000	4	775.000.000	4	775.000.000		
4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum				500.000.000		509.000.000		515.000.000		545.000.000		548.000.000		
Terlaksananya Fasilitas dan	Presentase Kegiatan	3	83,33%	500.000.000	83,33%	509.000.000	83,33%	515.000.000	83,33%	545.000.000	83,33%			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Dengan Satuan:Persen)													
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				100.000.000		102.000.000		104.000.000		115.000.000		115.000.000		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	550	550	100.000.000	550	102.000.000	550	104.000.000	550	115.000.000	550	115.000.000		
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum				300.000.000		305.000.000		307.000.000		317.000.000		318.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Dengan Satuan:Kasus)	12	12	300.000.000	12	305.000.000	12	307.000.000	12	317.000.000	12	318.000.000		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				100.000.000		102.000.000		104.000.000		113.000.000		115.000.000		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dengan Satuan:Dokumen)	626	626	100.000.000	626	102.000.000	626	104.000.000	626	113.000.000	626	115.000.000		
4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				65.000.000		67.000.000		69.000.000		78.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Capaian Fasilitasi kerja sama daerah yang disepakati (Dengan Satuan:Dokumen	5	5	65.000.000	5	67.000.000	5	69.000.000	5	78.000.000	5	80.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	)													
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				65.000.000		67.000.000		69.000.000		78.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	65.000.000	5	67.000.000	5	69.000.000	5	78.000.000	5	80.000.000		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1.543.854.000		1.572.354.000		1.590.354.000		1.670.854.000		1.727.854.000		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	84,35	84,37		84,39		84,41		84,43		84,45		4.01.0.00. 0.00.01.0 000 - SEKRETA RIAT DAERAH	
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				200.000.000		204.000.000		208.000.000		228.000.000		230.000.000		
Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Capaian Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Return on Aset (ROA) BUMD (Dengan Satuan:Persen)	3,83	4,09				4,22				4,35			
	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				125.000.000		127.000.000		129.000.000		138.000.000		140.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	125.000.000	2	127.000.000	2	129.000.000	2	138.000.000	2	140.000.000		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				75.000.000		77.000.000		79.000.000		90.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	75.000.000	1	77.000.000	1	79.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000		
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				230.000.000		235.000.000		239.000.000		259.000.000		259.000.000		
Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen pengendalian Pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	230.000.000	12	235.000.000	12	239.000.000	12	259.000.000	12	259.000.000		
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				80.000.000		82.000.000		84.000.000		94.000.000		94.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	80.000.000	12	82.000.000	12	84.000.000	12	94.000.000	12	94.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				150.000.000		153.000.000		155.000.000		165.000.000		165.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	150.000.000	12	153.000.000	12	155.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000		
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				720.000.000		737.000.000		743.000.000		770.000.000		820.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Layanan Pengadaan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	720.000.000	2	737.000.000	2	743.000.000	2	770.000.000	2	820.000.000		
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				400.000.000		410.000.000		412.000.000		420.000.000		423.000.000		
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	400.000.000	2	410.000.000	2	412.000.000	2	420.000.000	2	423.000.000		
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				70.000.000		72.000.000		74.000.000		80.000.000		84.000.000		
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	70.000.000	4	72.000.000	4	74.000.000	4	80.000.000	4	84.000.000		
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang				250.000.000		255.000.000		257.000.000		270.000.000		313.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Jasa														
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Orang)	200	200	250.000.000	200	255.000.000	200	257.000.000	200	270.000.000	200	313.000.000		
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				393.854.000		396.354.000		400.354.000		413.854.000		418.854.000		
Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Laporan)	4	3	393.854.000	3	396.354.000	3	400.354.000	3	413.854.000	3	418.854.000		
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				366.854.000		366.854.000		366.854.000		366.854.000		366.854.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dengan	1	1	366.854.000	1	366.854.000	1	366.854.000	1	366.854.000	1	366.854.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Satuan:Dokumen)													
4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				7.000.000		7.500.000		9.500.000		15.000.000		18.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	7.000.000	1	7.500.000	1	9.500.000	1	15.000.000	1	18.000.000		
4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				20.000.000		22.000.000		24.000.000		32.000.000		34.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumaha n Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.000.000	1	32.000.000	1	34.000.000		

4.3 Uraian Sub kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang ada. Program dan kegiatan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Secara garis besar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen di Tahun 2025-2029 mencakup 3 program dengan 18 kegiatan dan 53 sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4. 5

Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daeah (Bagian Umum) 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Mendukung Program Unggulan Bupati : "AYEM TENTREM GUYUB RUKUN"
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bagian Umum) 1. Penyediaan Komponen Instalasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan Mebel	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
			Penataan Organisasi (Bagian Organisasi) 1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Bagian Prokopim) 1. Fasilitas Keprotokolan 2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan (Bagian Pemerintahan) 1. Penataan Administrasi Pemerintahan 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati: "ASN NYAMAN, TERAMPIL, DAN INOVATIF"
			Fasilitasi Kerjasama Daerah (Bagian Pemerintahan) 1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Bagian Hukum) 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 2. Fasilitasi Bantuan Hukum 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra) 1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
3.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah	Administrasi Pembangunan (Bagian Administrasi Pembangunan) 1. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 3. Pelaksanaan Pembangunan	Mendukung Program Unggulan Bupati : "NGOBROL DAN REMBUG BARENG BIYUNGE"
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Bagian Perekonomian&SDA)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 3. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (Bagian Perekonomian&SDA) 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai tolok ukur kinerja utama organisasi. Indikator Kinerja Utama dirancang agar mampu menggambarkan capaian hasil (*outcome*) yang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap mandat dan fungsi organisasi, keterkaitan dengan sasaran strategis daerah, serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung terhadap sasaran strategis dan program prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan sistem pelaporan instansi pemerintah. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi dasar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan strategi organisasi, sekaligus sebagai acuan dalam perumusan kebijakan dan penyempurnaan program kerja pada periode berikutnya.

Terdapat sebelas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditangani oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yaitu Nilai EKPPD, Indeks Fasilitasi Keagamaan, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Zakat Nasional (IZN), Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah, Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan, Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana, Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Indikator Tujuan									
1	Nilai EKPPD	Nilai	3,27	3,28	3,29	3,31	3,32	3,33	3,34	
2	Indeks Fasilitas Keagamaan	Indeks	-	-	7,40	8,29	9,02	9,66	10,36	
B	Indikator Sasaran									
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,52	98,53	98,54	98,55	98,56	98,57	98,58	
2	Indeks kualitas kebijakan Pembangunan	Indeks	90,34	90,40	90,70	91,00	92,00	93,00	94,00	
3	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,74	4,78	4,79	4,81	4,83	4,85	4,86	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,40	90,77	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
5	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas legalitas kelembagaan	Persen	-	-	7,13	9,52	12,57	16,55	22,63	
6	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas peningkatan kapasitas	Persen	-	5,44	6,50	7,00	7,31	7,45	7,48	
7	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas sarana prasarana	Persen	-	-	14,88	17,35	19,16	20,38	21,13	

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bagian ini memaparkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah sesuai kewenangan perangkat daerah, serta memastikan setiap program dan kegiatan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan terukur. Indikator Kinerja Kunci disajikan dalam Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Indikator Tujuan									
1	Nilai EKPPD	Nilai	3,27	3,28	3,29	3,31	3,32	3,33	3,34	
2	Indeks Fasilitasi Keagamaan	Indeks	-	-	7,40	8,29	9,02	9,66	10,36	
B	Indikator Sasaran									
1	Indeks Reformasi Hukum *(B24)	Indeks	98,52	98,53	98,54	98,55	98,56	98,57	98,58	
2	Indeks kualitas kebijakan Pembangunan	Indeks	90,34	90,40	90,70	91,00	92,00	93,00	94,00	
3	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,74	4,78	4,79	4,81	4,83	4,85	4,86	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,40	90,77	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
5	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Persen	-	-	7,13	9,52	12,57	16,55	22,63	
6	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi	Persen	-	5,44	6,50	7,00	7,31	7,45	7,48	

	peningkatan kapasitas									
7	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana	Persen	-	-	14,88	17,35	19,16	20,38	21,13	
C	Indikator Program									
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	67,84	70	70	73	73	75	75	
2	Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	90,40	90,40	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,60	72,62	72,64	72,66	72,68	72,70	72,72	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Indeks Kesalehan Sosial *(B17)	Indeks	82,38	82,41	82,79	83,16	83,54	83,91	84,29	
2	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran *(B19) (Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana dan prasarana sampai tahun n)	Lembaga	NA	NA	238	300	362	424	486	
3	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan *(B20) (Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan sampai tahun n)	Lembaga	NA	NA	129	160	191	220	251	
4	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas sampai tahun n	Lembaga	-	87	104	121	138	155	172	

5	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	Persen	NA	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	
6	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	
Aspek Daya Saing Daerah										
1	Return on Aset (ROA) BUMD *(B32)	Persen	3,83	4,08	4,09	4,22	4,35	4,48	4,59	
Aspek Pelayanan Umum										
1	Indeks Reformasi Birokrasi *(A2)	Indeks	85,74	86,03	86,33	86,62	86,91	87,21	87,50	
3	Indeks Pelayanan Publik *(B23)	Indeks	4,59	4,61	4,63	4,66	4,68	4,70	4,72	
4	Nilai SAKIP	Nilai	67,54	68,78	70,03	71,27	72,51	73,76	75,00	
5	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB *(B42)	Persen	1,53	1,60	1,61	1,61	1,62	1,62	1,63	
6	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB *(B43)	Persen	1,24	1,44	1,45	1,45	1,46	1,46	1,47	
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
Fungsi Pengadaan										
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	25,96	28,18	31,33	34,48	37,64	40,79	43,94	
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	18,39	19,36	20,33	21,30	22,27	23,24	24,21	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	
Pelayanan Publik										
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	4,59	4,72	4,83	4,94	5,00	5,00	5,00	

BAB V
PENUTUP

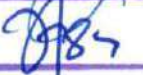
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Tahun 2025-2029. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen setiap tahunnya selama lima tahun ke depan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kebumen, 19 September 2025

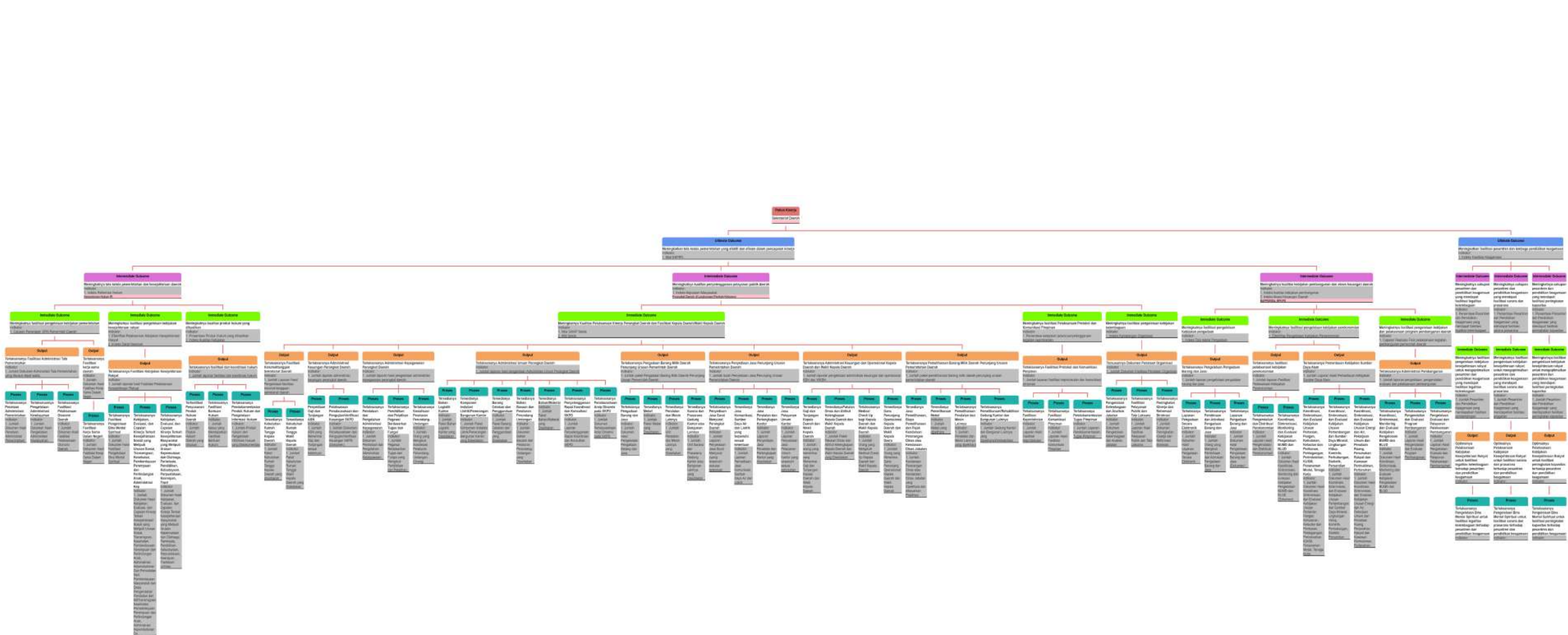
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Xunita P	
Hantari Mahademi	



Edi Rianto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19701101 199803 1 006

LAMPIRAN



TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				54.600.885.052,00		51.027.284.297,00		66.830.299.885,00		68.084.872.394,00		53.843.329.382,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				33.382.031.052,00		32.282.930.297,00		33.037.945.885,00		34.080.018.394,00		34.727.475.382,00		
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,60	72,64	33.382.031.052,00	72,66	32.282.930.297,00	72,68	33.037.945.885,00	72,70	34.080.018.394,00	72,72	34.727.475.382,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DAERAH	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	90,40	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60			
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20.518.302.843,00		21.159.702.088,00		21.884.217.676,00		22.662.290.185,00		23.199.747.173,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	161	161	20.518.302.843,00	161	21.159.702.088,00	161	21.884.217.676,00	161	22.662.290.185,00	161	23.199.747.173,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.392.752.692,00		21.031.751.914,00		21.754.844.019,00		22.529.594.595,00		23.066.785.504,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	161	161	20.392.752.692,00	161	21.031.751.914,00	161	21.754.844.019,00	161	22.529.594.595,00	161	23.066.785.504,00		
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				125.550.151,00		127.950.174,00		129.373.657,00		132.695.590,00		132.961.669,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	4	125.550.151,00	4	127.950.174,00	4	129.373.657,00	4	132.695.590,00	4	132.961.669,00		
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				175.000.000,00		179.000.000,00		183.000.000,00		191.000.000,00		191.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	300	300	175.000.000,00	300	179.000.000,00	300	183.000.000,00	300	191.000.000,00	300	191.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	6		6		6		6		6			
4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				25.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	6	25.000.000,00	6	27.000.000,00	6	29.000.000,00	6	33.000.000,00	6	33.000.000,00		
4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00		52.000.000,00		54.000.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	50.000.000,00	10	52.000.000,00	10	54.000.000,00	10	58.000.000,00	10	58.000.000,00		
4.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	300	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.130.000.000,00		2.140.000.000,00		2.150.000.000,00		2.171.000.000,00		2.171.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	2.130.000.000,00	1	2.140.000.000,00	1	2.150.000.000,00	1	2.171.000.000,00	1	2.171.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	375	12		12		12		12		12			
	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi						100.000.000,00				102.000.000,00			
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	100.000.000,00	4	102.000.000,00	4	104.000.000,00	4	108.000.000,00	4	108.000.000,00		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	12	950.000.000,00	12	950.000.000,00	12	950.000.000,00	12	950.000.000,00	12	950.000.000,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000,00		42.000.000,00		44.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	40.000.000,00	4	42.000.000,00	4	44.000.000,00	4	48.000.000,00	4	48.000.000,00		
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				35.000.000,00		37.000.000,00		39.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	12	35.000.000,00	12	37.000.000,00	12	39.000.000,00	12	43.000.000,00	12	43.000.000,00		
4.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				35.000.000,00		37.000.000,00		39.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	4	35.000.000,00	4	37.000.000,00	4	39.000.000,00	4	44.000.000,00	4	44.000.000,00		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	375	12	950.000.000,00	12	950.000.000,00	12	950.000.000,00	12	950.000.000,00	12	950.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	28.000.000,00	1	28.000.000,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.600.000.000,00		653.000.000,00		657.000.000,00		760.000.000,00		810.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	30	2.600.000.000,00	30	653.000.000,00	30	657.000.000,00	30	760.000.000,00	30	810.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	5		5		5		5		5			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	15		15		15		15		15			
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000,00		103.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	5	100.000.000,00	5	103.000.000,00	5	105.000.000,00	5	110.000.000,00	5	110.000.000,00		
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	15	325.000.000,00	15	350.000.000,00		
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.200.000.000,00		250.000.000,00		252.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	30	2.200.000.000,00	30	250.000.000,00	30	252.000.000,00	30	325.000.000,00	30	350.000.000,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.912.332.809,00		2.969.832.809,00		2.978.332.809,00		2.996.332.809,00		2.998.332.809,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.912.332.809,00	12	2.969.832.809,00	12	2.978.332.809,00	12	2.996.332.809,00	12	2.998.332.809,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000,00		8.500.000,00		10.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	8.000.000,00	12	8.500.000,00	12	10.000.000,00	12	14.000.000,00	12	14.000.000,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.250.000.000,00		1.255.000.000,00		1.260.000.000,00		1.270.000.000,00		1.272.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.250.000.000,00	12	1.255.000.000,00	12	1.260.000.000,00	12	1.270.000.000,00	12	1.272.000.000,00		
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000,00		62.000.000,00		64.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	60.000.000,00	12	62.000.000,00	12	64.000.000,00	12	68.000.000,00	12	68.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.594.332.809,00		1.644.332.809,00		1.644.332.809,00		1.644.332.809,00		1.644.332.809,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.594.332.809,00	12	1.644.332.809,00	12	1.644.332.809,00	12	1.644.332.809,00	12	1.644.332.809,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.570.000.000,00		1.657.000.000,00		1.629.000.000,00		1.663.000.000,00		1.667.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	109	113	1.570.000.000,00	113	1.657.000.000,00	113	1.629.000.000,00	113	1.663.000.000,00	113	1.667.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	25		25		25		25		25			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	20		20		20		20		20			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	4		4		4		4		4			
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				900.000.000,00		910.000.000,00		920.000.000,00		940.000.000,00		942.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	109	113	900.000.000,00	113	910.000.000,00	113	920.000.000,00	113	940.000.000,00	113	942.000.000,00		
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	20	100.000.000,00	20	105.000.000,00	20	110.000.000,00	20	115.000.000,00	20	115.000.000,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000,00		72.000.000,00		74.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	25	70.000.000,00	25	72.000.000,00	25	74.000.000,00	25	78.000.000,00	25	78.000.000,00		
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				500.000.000,00		570.000.000,00		525.000.000,00		530.000.000,00		532.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	4	500.000.000,00	4	570.000.000,00	4	525.000.000,00	4	530.000.000,00	4	532.000.000,00		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.596.395.400,00		1.596.395.400,00		1.596.395.400,00		1.596.395.400,00		1.598.395.400,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	7	12	1.596.395.400,00	12	1.596.395.400,00	12	1.596.395.400,00	12	1.596.395.400,00	12	1.598.395.400,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	8	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				664.395.400,00		664.395.400,00		664.395.400,00		664.395.400,00		664.395.400,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	664.395.400,00	2	664.395.400,00	2	664.395.400,00	2	664.395.400,00	2	664.395.400,00		
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		202.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	202.000.000,00		
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	8	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00		
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				726.000.000,00		726.000.000,00		726.000.000,00		726.000.000,00		726.000.000,00		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	7	12	726.000.000,00	12	726.000.000,00	12	726.000.000,00	12	726.000.000,00	12	726.000.000,00		
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				900.000.000,00		920.000.000,00		940.000.000,00		960.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	900.000.000,00	12	920.000.000,00	12	940.000.000,00	12	960.000.000,00	12	1.000.000.000,00		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				650.000.000,00		660.000.000,00		670.000.000,00		680.000.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	650.000.000,00	12	660.000.000,00	12	670.000.000,00	12	680.000.000,00	12	700.000.000,00		
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				250.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12	12	250.000.000,00	12	260.000.000,00	12	270.000.000,00	12	280.000.000,00	12	300.000.000,00		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				355.000.000,00		364.000.000,00		370.000.000,00		401.000.000,00		407.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	355.000.000,00	1	364.000.000,00	1	370.000.000,00	1	401.000.000,00	1	407.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	1		1		1		1					
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				80.000.000,00		112.000.000,00		114.000.000,00		124.000.000,00		125.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	112.000.000,00	1	114.000.000,00	1	124.000.000,00	1	125.000.000,00		
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				200.000.000,00		155.000.000,00		157.000.000,00		167.000.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	155.000.000,00	1	157.000.000,00	1	167.000.000,00	1	170.000.000,00		
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				75.000.000,00		97.000.000,00		99.000.000,00		110.000.000,00		112.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	75.000.000,00	1	97.000.000,00	1	99.000.000,00	1	110.000.000,00	1	112.000.000,00		
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				625.000.000,00		644.000.000,00		650.000.000,00		679.000.000,00		685.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	3	3	625.000.000,00	3	644.000.000,00	3	650.000.000,00	3	679.000.000,00	3	685.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	2	2				2		2					
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	3	3				3		3		3			
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan				370.000.000,00		375.000.000,00		377.000.000,00		388.000.000,00		390.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	3	3	370.000.000,00	3	375.000.000,00	3	377.000.000,00	3	388.000.000,00	3	390.000.000,00		
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitas Komunika si Pimpinan				140.000.000,00		142.000.000,00		144.000.000,00		153.000.000,00		155.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	2	2	140.000.000,00	2	142.000.000,00	2	144.000.000,00	2	153.000.000,00	2	155.000.000,00		
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				115.000.000,00		127.000.000,00		129.000.000,00		138.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	3	3	115.000.000,00	3	127.000.000,00	3	129.000.000,00	3	138.000.000,00	3	140.000.000,00		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				19.675.000.000,00		17.172.000.000,00		32.202.000.000,00		32.334.000.000,00		17.388.000.000,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)	67,84	70,00	19.675.000.000,00	73,00	17.172.000.000,00	73,00	32.202.000.000,00	75,00	32.334.000.000,00	75,00	17.388.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DAERAH	
	Indeks Zakat Nasional (Indeks)	0,53	0,59		0,62		0,65		0,68		0,71			
	Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				410.000.000,00		416.000.000,00		422.000.000,00		456.000.000,00		495.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	2	2	410.000.000,00	2	416.000.000,00	2	422.000.000,00	2	456.000.000,00	2	495.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				80.000.000,00		82.000.000,00		84.000.000,00		93.000.000,00		95.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	82.000.000,00	1	84.000.000,00	1	93.000.000,00	1	95.000.000,00		
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				80.000.000,00		82.000.000,00		84.000.000,00		93.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	2	2	80.000.000,00	2	82.000.000,00	2	84.000.000,00	2	93.000.000,00	2	95.000.000,00		
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				250.000.000,00		252.000.000,00		254.000.000,00		270.000.000,00		305.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	2	2	250.000.000,00	2	252.000.000,00	2	254.000.000,00	2	270.000.000,00	2	305.000.000,00		
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				18.700.000.000,00		16.180.000.000,00		31.196.000.000,00		31.255.000.000,00		16.265.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	7	7	18.700.000.000,00	7	16.180.000.000,00	7	31.196.000.000,00	7	31.255.000.000,00	7	16.265.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4	4		4		4		4					
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	5	5		5		5		5					
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				17.550.000.000,00		15.020.000.000,00		30.030.000.000,00		30.060.000.000,00		15.070.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	5	5	17.550.000.000,00	5	15.020.000.000,00	5	30.030.000.000,00	5	30.060.000.000,00	5	15.070.000.000,00		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				400.000.000,00		405.000.000,00		407.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	7	7	400.000.000,00	7	405.000.000,00	7	407.000.000,00	7	420.000.000,00	7	420.000.000,00		
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				750.000.000,00		755.000.000,00		759.000.000,00		775.000.000,00		775.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4	4	750.000.000,00	4	755.000.000,00	4	759.000.000,00	4	775.000.000,00	4	775.000.000,00		
4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum				500.000.000,00		509.000.000,00		515.000.000,00		545.000.000,00		548.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	626	626	500.000.000,00	626	509.000.000,00	626	515.000.000,00	626	545.000.000,00	626	548.000.000,00		
	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	550	550				550				550			
	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	12	12				12				12			
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah				100.000.000,00		102.000.000,00		104.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	550	550	100.000.000,00	550	102.000.000,00	550	104.000.000,00	550	115.000.000,00	550	115.000.000,00		
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitas Bantuan Hukum				300.000.000,00		305.000.000,00		307.000.000,00		317.000.000,00		318.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	12	12	300.000.000,00	12	305.000.000,00	12	307.000.000,00	12	317.000.000,00	12	318.000.000,00		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				100.000.000,00		102.000.000,00		104.000.000,00		113.000.000,00		115.000.000,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	626	626	100.000.000,00	626	102.000.000,00	626	104.000.000,00	626	113.000.000,00	626	115.000.000,00		
4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah				65.000.000,00		67.000.000,00		69.000.000,00		78.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	5	5	65.000.000,00	5	67.000.000,00	5	69.000.000,00	5	78.000.000,00	5	80.000.000,00		
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				65.000.000,00		67.000.000,00		69.000.000,00		78.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	5	5	65.000.000,00	5	67.000.000,00	5	69.000.000,00	5	78.000.000,00	5	80.000.000,00		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1.543.854.000,00		1.572.354.000,00		1.590.354.000,00		1.670.854.000,00		1.727.854.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	84,35	84,37	1.543.854.000,00	84,39	1.572.354.000,00	84,41	1.590.354.000,00	84,43	1.670.854.000,00	84,45	1.727.854.000,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				200.000.000,00		204.000.000,00		208.000.000,00		228.000.000,00		230.000.000,00		
Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	204.000.000,00	1	208.000.000,00	1	228.000.000,00	1	230.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2	2				2				2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				125.000.000,00		127.000.000,00		129.000.000,00		138.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2	2	125.000.000,00	2	127.000.000,00	2	129.000.000,00	2	138.000.000,00	2	140.000.000,00		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				75.000.000,00		77.000.000,00		79.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	1	1	75.000.000,00	1	77.000.000,00	1	79.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00		
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				230.000.000,00		235.000.000,00		239.000.000,00		259.000.000,00		259.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12	12	230.000.000,00	12	235.000.000,00	12	239.000.000,00	12	259.000.000,00	12	259.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	12	12				12				12			
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				80.000.000,00		82.000.000,00		84.000.000,00		94.000.000,00		94.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	12	12	80.000.000,00	12	82.000.000,00	12	84.000.000,00	12	94.000.000,00	12	94.000.000,00		
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaa Pembangunan				150.000.000,00		153.000.000,00		155.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12	12	150.000.000,00	12	153.000.000,00	12	155.000.000,00	12	165.000.000,00	12	165.000.000,00		
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				720.000.000,00		737.000.000,00		743.000.000,00		770.000.000,00		820.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	2	2	720.000.000,00	2	737.000.000,00	2	743.000.000,00	2	770.000.000,00	2	820.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	200	200				200				200			
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4	4				4				4			
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				400.000.000,00		410.000.000,00		412.000.000,00		420.000.000,00		423.000.000,00		
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	2	2	400.000.000,00	2	410.000.000,00	2	412.000.000,00	2	420.000.000,00	2	423.000.000,00		
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				70.000.000,00		72.000.000,00		74.000.000,00		80.000.000,00		84.000.000,00		
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4	4	70.000.000,00	4	72.000.000,00	4	74.000.000,00	4	80.000.000,00	4	84.000.000,00		
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				250.000.000,00		255.000.000,00		257.000.000,00		270.000.000,00		313.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	200	200	250.000.000,00	200	255.000.000,00	200	257.000.000,00	200	270.000.000,00	200	313.000.000,00		
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				393.854.000,00		396.354.000,00		400.354.000,00		413.854.000,00		418.854.000,00		
Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1	1	393.854.000,00	1	396.354.000,00	1	400.354.000,00	1	413.854.000,00	1	418.854.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1	1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1	1				1				1			
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				366.854.000,00		366.854.000,00		366.854.000,00		366.854.000,00		366.854.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1	1	366.854.000,00	1	366.854.000,00	1	366.854.000,00	1	366.854.000,00	1	366.854.000,00		
4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				7.000.000,00		7.500.000,00		9.500.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	9.500.000,00	1	15.000.000,00	1	18.000.000,00		
4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		32.000.000,00		34.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	32.000.000,00	1	34.000.000,00		

Indikator Kinerja Kunci Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Indikator Tujuan									
1	Nilai EKPPD	Nilai	3,27	3,28	3,29	3,31	3,32	3,33	3,34	
2	Indeks Fasilitas Keagamaan	Indeks	-	-	7,40	8,29	9,02	9,66	10,36	
B	Indikator Sasaran									
1	Indeks Reformasi Hukum *(B24)	Indeks	98,52	98,53	98,54	98,55	98,56	98,57	98,58	
2	Indeks kualitas kebijakan Pembangunan	Indeks	90,34	90,40	90,70	91,00	92,00	93,00	94,00	
3	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,74	4,78	4,79	4,81	4,83	4,85	4,86	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,40	90,77	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
5	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas legalitas kelembagaan	Persen	-	-	7,13	9,52	12,57	16,55	22,63	
6	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas peningkatan kapasitas	Persen	-	5,44	6,50	7,00	7,31	7,45	7,48	
7	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas sarana prasarana	Persen	-	-	14,88	17,35	19,16	20,38	21,13	
C	Indikator Program									
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	67,84	70	70	73	73	75	75	
2	Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	90,40	90,40	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,60	72,62	72,64	72,66	72,68	72,70	72,72	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat										

1	Indeks Kesalehan Sosial *(B17)	Indeks	82,38	82,41	82,79	83,16	83,54	83,91	84,29	
2	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitas Anggaran *(B19) (Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas sarana dan prasarana sampai tahun n)	Lembaga	NA	NA	238	300	362	424	486	
3	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitas Pendampingan *(B20) (Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas legalitas kelembagaan sampai tahun n)	Lembaga	NA	NA	129	160	191	220	251	
4	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas peningkatan kapasitas sampai tahun n	Lembaga	-	87	104	121	138	155	172	
5	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	Persen	NA	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	
6	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	
Aspek Daya Saing Daerah										
1	Return on Aset (ROA) BUMD *(B32)	Persen	3,83	4,08	4,09	4,22	4,35	4,48	4,59	
Aspek Pelayanan Umum										
1	Indeks Reformasi Birokrasi *(A2)	Indeks	85,74	86,03	86,33	86,62	86,91	87,21	87,50	
3	Indeks Pelayanan Publik *(B23)	Indeks	4,59	4,61	4,63	4,66	4,68	4,70	4,72	
4	Nilai SAKIP	Nilai	67,54	68,78	70,03	71,27	72,51	73,76	75,00	
5	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB *(B42)	Persen	1,53	1,60	1,61	1,61	1,62	1,62	1,63	
6	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB *(B43)	Persen	1,24	1,44	1,45	1,45	1,46	1,46	1,47	

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
Fungsi Pengadaan										
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	25,96	28,18	31,33	34,48	37,64	40,79	43,94	
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	18,39	19,36	20,33	21,30	22,27	23,24	24,21	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	
Pelayanan Publik										
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	4,59	4,72	4,83	4,94	5,00	5,00	5,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144, 381410, 381205 Faksimile (0287) 381423,
Laman setda.kebumenkab.go.id Pos-el setda@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 1795 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 1795 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan		
				Indeks Zakat Nasional		
				Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan		
1.1		Meningkatkan Tata Kelola		Nilai EKPPD	Formulasi Pengukuran:	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
		Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Pencapaian Kinerja dan			Dilakukan dengan cara menghitung dan menilai total indeks komposit terhadap 2 variabel utama yaitu: - Indeks capaian kinerja Terdiri dari penilaian: - tataran pengambil kebijakan meliputi kinerja KDH dan DPRD - tataran pelaksana kebijakan, dilakukan terhadap Perangkat Daerah Penilaian variabel indeks kesesuaian materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan pada LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan (sesuai PP No.3 Tahun 2007 dan turunannya untuk tahun 2020-2021. PP No 13 Tahun 2019 untuk penilaian" Tipe Pengukuran: Non Kumulatif	Daerah (EKPPD) adalah nilai yang dihasilkan dari suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai ini dihitung berdasarkan Indeks Komposit Kinerja (IKK) yang mencakup berbagai indikator kinerja utama (IKU). Data yang digunakan untuk evaluasi ini bersumber dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah Pusat, serta sumber data pelengkap lainnya.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	
1.1.1			Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan daerah	Indeks Reformasi Hukum	Formulasi Pengukuran: Diperoleh dengan variabel dan bobot sebagai berikut: 1. tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan bobot 25 2. kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas bobot 25 3. kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu bobot 30	Instrumen untuk mengukur efektivitas reformasi hukum di pemerintahan melalui penilaian empat variabel: penguatan koordinasi harmonisasi regulasi, re-regulasi dan deregulasi peraturan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kompetensi ASN perancang peraturan.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					4. penataan database peraturan perundang-undangan bobot 20 Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Hukum Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	
1.1.2			Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	Formulasi Pengukuran: "0,30x(kinerja layanan pengadaan) + 0,50x(kinerja pengendalian) + 0,20x(kinerja perekonomian) Keterangan: Kinerja Layanan Pengadaan = 0,60x(persentase RUP yang diumumkan melalui aplikasi SIRUP) + 0,40x(jumlah pelanggan internal eksternal yang puas / jumlah pelanggan yang disurvei x 100%)	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah melalui tiga aspek utama: kinerja layanan pengadaan, kinerja pengendalian, dan kinerja perekonomian. Indeks ini menunjukkan sejauh mana kebijakan pembangunan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Kinerja Pengendalian = jumlah realisasi fisik OPD dalam % + jumlah realisasi keuangan OPD dalam % Kinerja Perekonomian = unit kerja* yang difasilitasi dalam kebijakan perekonomian / jumlah sasaran unit kerja* yang difasilitasi dalam kebijakan perekonomian x 100%" Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Perekonomian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	dilaksanakan secara efisien, terkontrol, dan berdampak pada dukungan terhadap perekonomian.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
				Indeks Akses Keuangan Daerah	Formulasi Pengukuran: Dengan agregasi Linear dari Dimensi, indikator serta bobot serta bobot sebagai berikut: - Dimensi Penggunaan dengan indikator: - Jumlah rekening pihak ketiga dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,1 Sumber Data OJK - Jumlah pemilik tabungan dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,15 Sumber Susenas - Jumlah rekening e wallet dibandingkan jumlah penduduk dewasa bobot 0,1 Sumber Data BI - Jumlah rekening pinjaman ke UMKM dibandingkan total rekening pinjaman, bobot 0,13 Sumber Data OJK - Jumlah rekening pinjaman individu dibandingkan	Alat ukur komprehensif yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengukur kondisi dan pencapaian inklusi keuangan di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia Berfungsi sebagai instrumen strategis untuk Penyelarasan Target, Pemantauan Kinerja dan Perumusan Kebijakan bertujuan untuk mendukung target nasional inklusi keuangan, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					jumlah penduduk dewasa bobot 0,05 Sumber Data OJK f. Jumlah rekening pinjaman ke UMKM perempuan dibandingkan rekening pinjaman UMKM total, bobot 0,07 Sumber Data OJK g. Jumlah polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk dewasa, bobot 0,07 Sumber Data OJK h. Jumlah pemilik BPJS PBI atau Jamkesda penduduk berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk berpenghasilan rendah, bobot 0,012 Sumber Data Susenas i. Jumlah pemilik BPJS Mandiri/Asuransi Swasta/Jamkes Perusahaan penduduk non berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk non	

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					berpenghasilan rendah, bobot 0,018 Sumber Data Susenas 2. Dimensi Ketersediaan dengan indikator: a. Ketersediaan ATM per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,05 Sumber Data OJK b. Ketersediaan Agen Laku Pandai per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,08 Sumber Data OJK c. QRIS Ketersediaan merchant QRIS per 100.000 penduduk dewasa, bobot 0,07 Sumber Data OJK 3. Dimensi Kedalaman dengan indikator: a. Rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB bobot 0,05 Sumber Data OJK b. Rasio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman, bobot 0,05 Sumber Data OJK	

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Rumus : $IKAD_q = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm} \right) \times 10$ a = Indikator dari masing masing dimensi Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Otoritas Jasa Keuangan Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	
1.1.3			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Formulasi Pengukuran: Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan,saran dan masukan Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	diterima dari unit penyelenggara layanan. IKM dihitung berdasarkan penilaian masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang mencerminkan standar mutu layanan, efisiensi proses, kompetensi pelaksana, serta kenyamanan dan aksesibilitas layanan.
2.	Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan					

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
2.1		Meningkatkan Fasilitas Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan		Indeks Fasilitas Keagamaan	Formulasi Pengukuran : $(10\% \times \text{Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas legalitas kelembagaan sampai dengan tahun } n) + (80\% \times \text{Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas peningkatan kapasitas sampai dengan tahun } n) + (10\% \times \text{Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas sarana prasarana sampai dengan tahun } n)$ Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Indeks Fasilitas Keagamaan adalah ukuran komposit yang menggambarkan efektivitas pemerintah dalam memberikan dukungan, pembinaan, dan fasilitas kepada pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan. Indeks ini diukur melalui tiga bentuk fasilitas utama, yaitu: (1) fasilitas legalitas kelembagaan, (2) peningkatan kapasitas, dan (3) sarana prasarana. Nilai indeks mencerminkan tingkat pencapaian program fasilitas keagamaan secara keseluruhan hingga tahun berjalan (tahun n).

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
2.1.1			Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Formulasi Pengukuran: Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang belum ber-ID sampai dengan tahun n, dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memberikan fasilitasi legalitas kelembagaan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang belum memiliki identitas resmi (belum ber-ID) hingga tahun n. Fasilitasi legalitas kelembagaan yang dimaksud mencakup dukungan administrative, pendampingan, dan proses pengurusan legalitas kelembagaan agar lembaga memperoleh status resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.1.2			Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat	Formulasi Pengukuran: Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas sampai dengan tahun n dibagi Jumlah	Indikator ini mengukur tingkat pencapaian pemerintah dalam memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas kepada pesantren yang telah memiliki

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
			fasilitasi peningkatan kapasitas	fasilitasi peningkatan kapasitas	Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ber-ID sampai dengan tahun n, dikali 100% Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	identitas resmi (ber-ID) hingga tahun n. Fasilitasi peningkatan kapasitas mencakup seluruh bentuk dukungan yang bertujuan meningkatkan kompetensi, tata kelola, kualitas SDM, serta kemampuan kelembagaan lembaga keagamaan
2.1.3			Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi prasarana	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana	Formulasi Pengukuran: Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana sampai dengan tahun n dibagi Jumlah Populasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ber-ID sampai dengan tahun n, dikali 100%	Indikator ini mengukur proporsi pesantren dan lembaga Pendidikan keagamaan yang telah memperoleh fasilitasi sarana dan prasarana dari pemerintah hingga tahun n. Fasilitasi sarana prasarana yang dimaksud meliputi bantuan fisik, infrastruktur,

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Tipe Pengukuran: Kumulatif Sumber Data: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	peralatan, atau fasilitas penunjang yang bertujuan mendukung pelaksanaan pendidikan, pengembangan kelembagaan, serta peningkatan mutu layanan pendidikan keagamaan

Kebumen, 15 September 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144, 381410, 381205 Faksimile (0287) 381423,
Laman setda.kebumenkab.go.id Pos-el setda@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 900 /3392.1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sesuai arah kebijakan visi misi Kepala Daerah, perlu menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- melaksanakan orientasi mengenai Renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029;
 - mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029;
 - menyusun rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Desember 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen,



Edi Rianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 900 /3392.1 TAHUN 2024
TANGGAL
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Penanggung jawab	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Pengarah	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Pengarah	
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Pengarah	
5	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua	
6	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
7	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
8	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
9	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
10	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
11	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
12	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
13	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
14	Kepala Subbagian Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
15	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
16	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengdaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
17	Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
18	2 (dua) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	1. R. Toto Wahyu Pambudi S, S.Kom. 2. Khasnan Zakki, SH
19	2 (dua) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Haning Kartikasari, S.H. 2. Anugrah Tyas Utami, S.E.
20	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Wahyu Prasajo, S.E
21	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Rindam Baskoro Aji, S.STP, M.M.

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
22	Analisis Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Fauzi Ali Fahmi, S.STP.
23	2 (dua) orang Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Sulistyono Panji Pratiwi, S.Sos 2. Siti Honimah, S.E., M.M
24	Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kebumen	Anggota	Iswarno, S.M.
25	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kebumen	Anggota	Farid Ma'ruf, S.Pd.
26	2 (dua) Orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Dwi Apriliastuti, S.H. 2. Mokh Fatoni, S.H.
27	Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Agus Dwi Saputro, S.H., M.H.
28	Pengelola Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Muhdi, S.A.P
29	2 (dua) Orang Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Sangadah, SE, ME 2. Arifiawan Maretyadi, S.E.M.M
30	Analisis Infrastruktur pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Didi Priasmara, S.T.
31	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Agung Dwi Laksana, S.Tr.I.P.

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
32	3 (tiga) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Mugi Handayani, S.E. 2. Eko Yuniarto, SE 3. Bagus Budi Wijaya, SE
33	Analisis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Rini Kharismawati, S.E.
34	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Yogo Sariwusono, S.H, M.Si
35	Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Ibnu Hajar, S.Sos.
36	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Tri Rianto, S.E.
37	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Deni Nofiastruti, S.Sos


 Sekretaris Daerah
 Kabupaten Kebumen,
 Edi Rianto



Kebumen, 25 Maret 2025

Nomor : 000.7.2.2 / 938 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Forum Perangkat Daerah dan Forum Renstra Tahun 2025

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
3. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Rabu, 26 Maret 2025
waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
tempat : Ruang Co Working Lantai 1 Setda Kabupaten Kebumen
acara : Forum Renstra Tahun 2025 - 2029 dan Renja Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
keterangan : 1. Kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen untuk menjadi Narasumber;
2. Kepada para Kepala Bagian agar mengikutsertakan 1 (satu) orang PPTK.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kebumen
11.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kebumen
12.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen
13.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kebumen
14.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kebumen
15.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kebumen
16.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kebumen
17.	Kepala Bagian Umum Setda Kebumen
18.	Camat Kebumen
19.	Ketua Forum Anak Kabupaten Kebumen
20.	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen
21.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen
22.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
23.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
24.	Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
25.	Direktur PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen
26.	Ketua Baznas Kabupaten Kebumen
27.	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen
28.	Ketua Sekretariat Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Kebumen
29.	Rektor Universitas Putra Bangsa Kebumen
30.	Ketua LSM Formasi Kabupaten Kebumen

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL

: Rabu, 26 - Maret 2015

ACARA

: Forum Rantau & 2015-2015 dan Rantau 2015 Saka

TEMPAT

: Co Working

NO	NAMA	INSTANSI	PARAF	
1.			1.	
2.				2.
3.	Kus Haryadi	Itala	3.	
4.	Endie Satrika & S.T.	PDAM		4.
5.	Siti Durekati Y.	Bag. PDS	5.	
6.	Purnomawati	Bag. PSDA		6.
7.	Wahyuni S.	Bag. Pemasalahan	7.	
8.	Agus S.	Bag. Organisasi		8.
9.	Hans S.	BPKAD	9.	
10.	Dewi	Prokopim		10.
11.	Harun	Bag. HK	11.	
12.	Holmi Santoso	ATR/BPN		12.
13.	Yudi R.	BPS	13.	
14.	Jakes Hume	PMI		14.
15.	Rustan	BEPDM	15.	
16.	Agus	B. Pemasalahan		16.
17.	Amin Yasar	Bawaslu	17.	
18.	Pulung Saktiana Anjo	FA Kebumen		18.
19.	Mesya Putri Diandra	FA Kebumen	19.	
20.	Anugrah Tyas U	Bag. PBJ		20.
21.	Sulistyo Paji P	Kesra	21.	
22.	Eka Purno J	Ke. Kb		22.
23.	Firsty Candia N	KPA Kebumen	23.	
24.	Subrohmah	KPU Kebumen		24.
25.	TJAN 25	Bag. Kesra	25.	
26.	Dani N.	Prokopim		26.
27.	Wahyu S.	PDAM	27.	
28.	Yogo S	Bag. Uj		28.

HARI / TANGGAL

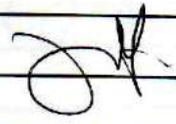
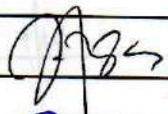
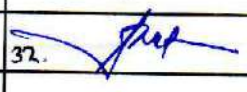
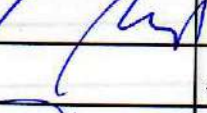
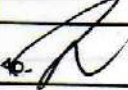
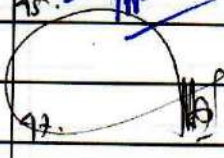
: Rabu, 26-3-2025

ACARA

: Forum Ristrat Th. 25-29 & Ristrat Th. 2026

TEMPAT

: K-Co Working Lt.1 Setda. Kabupaten

NO	NAMA	INSTANSI	PARAF
29.	Rini Kharisma	Bag. PSDA	29. 
30.	Xunitz P	Bappeda	30. 
31.	Hantari	Bappeda	31. 
32.	Suli	OPD	32. 
33.	Diana	Bag AP	33. 
34.	Sugala	Bag AP	34. 
35.	Dei April	Bag. Hukun	35. 
36.	Erni E	Prokopri	36. 
37.	Deitani Mar A	Bag. Umum	37. 
38.	Pacefiro	-	38. 
39.	Tugan	-	39. 
40.	Yuanis	Prokopri	40. 
41.	Lugnan F	Bawahan	41. 
42.	Windi K.T	Prokopri	42. 
43.	Rodiyah	Bag. Umum	43. 
44.	Agus Tjahjono	-	44. 
45.	Rahayu H.S	Bagan Umum	45. 
46.	Elly Prastiyanti	"	46. 
47.	Agus Riyadi	-	47. 
48.	Suyadi	-	48. 
49.	Dwi Astuti	-	49. 
50.	Suryono	-	50. 
51.	Iana	-	51. 
52.	Ngamilin	-	52. 
53.	Pohyani	-	53. 
54.	Dese P.k.	-	54. 
55.	Dwi	-	55. 
56.	Nica	-	56. 

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL

ACARA

TEMPAT

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144, 381410, 381205 Faksimile (0287) 381423,
Laman setda.kebumenkab.go.id Pos-el setda@kebumenkab.go.id

NOTULA

- Sidang/Rapat** : Forum Renstra 2025-2029 dan Renja 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
- Hari/Tanggal** : Rabu, 26 Maret 2025 ✓
- Surat Undangan** : Terlampir
- Waktu Sidang/Rapat** : Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
- Acara** : 1. Forum Renstra 2025-2029 dan Renja 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
- Pimpinan Sidang/Rapat**
- Ketua** : Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
- Sekretaris** : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kebumen
- Pencatat** : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kebumen
- Peserta sidang/rapat** : 1. Para Kabag di lingkungan Setda Kab. Kebumen
2. Para PPTK di lingkungan Setda
3. Komisi A DPRD, Beberapa Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perwakilan Camat, Kepala BPS Kabupaten Kebumen, Kepala BPN ATR, Kepala KPU, Kepala Bawaslu, Pimpinan Perguruan Tinggi Universitas Putra Bangsa, Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen, PDAM Kabupaten Kebumen, PMI Kabupaten Kebumen, KPA Kabupaten Kebumen, Ketua Youth Forum Geopark Kabupaten Kebumen, Ketua Forum Anak Kabupaten Kebumen (sebagaimana daftar hadir terlampir)
- Kegiatan Sidang/Rapat** : 1. Pembukaan dan pembacaan tata tertib Forum OPD
2. Menyanyikan Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen
3. Pembacaan doa
4. Laporan penyelenggara oleh Kabag Umum Setda Kab. Kebumen
5. Sambutan
Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kab Kebumen Bapak Edi Rianto, ST., MT adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Bahwa fungsi Sekda antara lain :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
 - d. Pengoordinasian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah
 - e. Pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol
 - f. Pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah
 - g. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Paparan oleh Assisten Administrasi Umum Setda antara lain;
- 1) Forum Renstra dan Renja 2026 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang utama adalah sudah melakukan persiapan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra -PD; Orientasi mengenai Renstra-PD; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra-PD; dan Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
 - 2) Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2021 s/d 2024 dengan program tujuan Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik serta sasarannya Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - 3) Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Tingkat kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi sudah tercapai, hanya pada Tingkat Kemiskinan ini yang perlu ada strategi dari antar OPD yang harus dilakukan sehingga tingkat kemiskinan tercapai.
 - 4) Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2026 dapat secara detail bapak/ibu melihat dalam materi yang telah kita sampaikan.

7. Paparan dari BAPPEDA (sebagai narasumber)
 - 1) Penyusunan Rancangan Awal Renstra-PD ;
Penyusunan rancangan awal Renstra-PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.dan Dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik
 - 2) Penyusunan Rancangan Renstra-PD;
 - ✓ Rancangan Renstra-PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra-PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra-PD.
 - ✓ Rancangan Renstra-PD dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
 - ✓ Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.
 - ✓ Rancangan Renstra_PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
8. Paparan dari BPKPD (sebagai narasumber)
 - 1) Pada pagu program Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen khususnya di Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual terdapat tren tahun anggaran 2026 menurun di bandingkan 2025 apakah yang menjadi penyebab
9. Paparan dari Inspektorat (sebagai narasumber)
 - 1) Untuk Target Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 khususnya pada Nilai SAKIP sudah cukup baik, hanya saya kedepan untuk ada peningkatan karena kita harus naik level menjadi BB. Perlunya sinergitas antar OPD sehingga dapat mencapai nilai tersebut.
 - 2) Sedang untuk indikator Pengentasan Kemiskinan perlu adanya pemecahan bersama menyangkut Setda selaku koordinator OPD.
10. Saran dan Masukan :
 - a. KPU Kabupaten Kebumen
Pasca Pemilu di KPU masih ada 2 agenda. Pada pemilihan 2024 untuk anggaran per jiwa adalah Rp. 42.000. Untuk Kebumen di pilkada agak naik interprestasinya yaitu 71% sisanya terdapat suara tidak sah karena antara lain tidak dicoblos dan dicoblos keduanya. Dari sini perlu adanya pendidikan berpolitik dan ini ada di Kesbang. Harapan KPU dari Pemda mengikutkan KPU dalam pendidikan

berpolitik. Terkait dengan dana hibah KPU terdapat sisa anggaran yang cukup banyak dan sudah dikembalikan ke Pemda.

Untuk selanjutnya harapan KPU untuk adanya update data kependudukan lebih cepat guna mempermudah untuk pemilihan selanjutnya dan sebagai data perencanaan anggaran Hibah 2029.

b. Bawaslu Kabupaten Kebumen

Perihal fungsi pengawasan di Bawaslu pada pilkada th 2024 sudah terselesaikan dan pada Bulan April Bawalu masih akan melakukan evaluasi dan laporan kinerja. Secara kelembagaan Bawaslu Kebumen belum menjadi Satker dan gedung yang ditempati dalam perjanjian selesai di Bulan April. Untuk itu dimohon peran Pemda dalam penempatan PNS di Bawaslu dan penyediaan tempat untuk kantor Bawaslu.

Terkait dana hibah untuk pilkada, Bawaslu perlu menghitung untuk SDM Pengawas, dan pengusulan dana cadangan dianggarkan mulai tahun 2027 dan 2028.

c. BPS

Visi Bupati terkait kemiskinan ditempatkan di nomor 1. Visi ini bukan hal yang mudah dan harus diturunkan per tahun 1%. Kebumen akan mampu mengupayakan hal tersebut dengan sarat melakukan harus lebih dari biasanya lebih ekstrim dalam mengupayakannya.

Perlu mendatangkan investor untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan juga kejujuran masyarakat dalam menjawab responden.

Notulis,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen,


Edi Rianto

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab.Kebumen MUHAMAD ARIFIN, S.Si., MT.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Maret 2025
Jam : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Co Working Setda Kab.Kebumen

Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

MENYEPAKATI

- KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 26 Maret 2025
Pimpinan Sidang
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

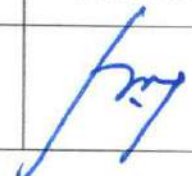

MUHAMAD ARIFIN, S.Si., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680722 199903 1 001

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Setda Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.		DPRD	DPRD Kab.Kebumen	
2.	Yunita Prasetyani, SE.MA.Mec.Dev	Unsur Perangkat Daerah	Bappeda Kab. Kebumen	
3.	Erna Dwi S	Unsur Kecamatan	Kecamatan Kebumen	
4.	Dr. Sulis Riptiono, SE. MM	Unsur Lembaga	Universitas Putra Bangsa	
5.	Firsty Candra N	Unsur Masyarakat/ LSM	KPA Kabupaten Kebumen	

DELEGASI OPD SETDA PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Drs.H.Sabar Irianto	PMI	PMI Cabang Kabupaten Kebumen	

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2025**

**1. PEMAPARAN OLEH PIMPINAN SIDANG ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**



2. PEMAPARAN OLEH NARASUMBER





3. PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH





4. DISKUSI





5. PENANDATANGANAN BERITA ACARA



